

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH****2.1 Aspek Geografi dan Demografi****2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah****a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Luas Wilayah Kota Kediri adalah 63,404 km², secara administratif terbagi menjadi tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Wilayah barat sungai secara keseluruhan termasuk dalam wilayah Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 24,6 km² yang terdiri dari 14 Kelurahan, dan timur sungai sebagian termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota yang terdiri dari 17 Kelurahan dengan luas wilayah seluruhnya 14,9 km² dan Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah 23,9 km² terdiri dari 15 Kelurahan.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kota Kediri Dirinci Menurut Kelurahan Tahun 2016

Kode	Kelurahan	Luas (Km²)
001	Pojok	5,153
002	Campurejo	1,409
003	Tamanan	1,077
004	Banjarmlati	0,954
005	Bandar Kidul	1,299
006	Lirboyo	1,037
007	Bandar Lor	1,113
008	Mojoroto	2,130
009	Sukorame	4,302
010	Bujel	1,590
011	Ngampel	1,468
012	Gayam	1,296
013	Mrican	1,109
014	Dermo	0,657
Luas Kecamatan Mojoroto		24,601
001	Manisrenggo	1,764
002	Rejomulyo	1,670
003	Ngronggo	2,585
004	Kaliombo	0,958
005	Kampungdalem	0,332

Kode	Kelurahan	Luas (Km²)
006	Setonopande	0,383
007	Ringinanom	0,050
008	Pakelan	0,214
009	Setonogedong	0,059
010	Kemasan	0,228
011	Jagalan	0,043
012	Banjaran	1,209
013	Ngadirejo	1,470
014	Dandangan	1,100
015	Balowerti	0,830
016	Pocanan	0,214
017	Semampir	1,791
Luas Kecamatan Kota		14,900
001	Blabak	3,354
002	Bawang	3,449
003	Betet	1,691
004	Tosaren	1,361
005	Banaran	0,974
006	Ngletih	1,237
007	Tempurejo	1,864
008	Ketami	1,894
009	Pesantren	1,356
010	Bangsals	1,029
011	Burengan	1,283
012	Tinalan	0,926
013	Pakunden	1,024
014	Singonegaran	0,99
015	Jamsaren	1,471
Kecamatan Pesantren		23,903

Sumber : BPS Kota Kediri

Secara Administrasi Batas wilayah Kota Kediri berbatasan dengan wilayah Kecamatan-Kecamatan yang termasuk wilayah Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gampengrejo;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wates dan Gurah;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kandat dan Ngadiluwih;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banyakan dan Semen;

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Kediri secara geografis terletak di sebelah selatan garis katulistiwa berada antara $111^{\circ}15'$ - $112^{\circ}03'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}45'$ - $7^{\circ}55'$ Lintang Selatan. Kota Kediri dipisahkan oleh Sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara sepanjang 7 Km. Wilayah barat sungai menjadi wilayah Kecamatan Mojoroto, sedangkan timur sungai terdiri dari Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren.

c. Topografi

Mayoritas ketinggian wilayah Kota Kediri (80,17%) berada pada ketinggian 63 m sampai 100 m dari permukaan laut yang terletak sepanjang sisi kiri dan kanan Kali Brantas. Untuk kemiringan, sebagian besar wilayah Kota Kediri merupakan dataran rendah dengan kemiringan antara 0 – 2% seluas 5,737 Ha atau 90,49%. Kondisi topografi wilayah relatif datar, yaitu pada kemiringan antara 0 s/d 40%. Ketinggian antara 15 – 40% berada di kawasan Gunung Maskumambang dengan ketinggian 300 mdpl dan Gunung Klotok 672 mdpl di bagian barat Kecamatan Mojoroto. Untuk Kecamatan Kota kondisi topografinya mayoritas berada pada kemiringan 0 – 2%. Untuk Kecamatan Pesantren kondisi topografi wilayah relatif datar, yaitu pada kemiringan antara 0 s/d 15% dengan ketinggian lebih kurang 67 mdpl.

d. Geologi

Secara Geologi Kota Kediri terbagi atas berbagai macam jenis batuan dan tanah. Sebagian wilayah Kecamatan Mojoroto memiliki endapan alluvium yang terdiri atas elemen kerakal, kerikil, pasir lempung, lumpur, dan sisa tumbuhan. Bahannya berwarna kelabu-kuning keruh-kehitaman, mudah lepas atau gembur. Pada wilayah Kecamatan Kota, jenis batuan yang ada adalah tuf vulkan intermedier dengan kedalaman lebih dari 25 cm

dan bertekstur tanah halus. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Pesantren, berdasarkan jenis batuanya termasuk dalam jenis batuan endapan lahar yang sebagian besar dari Gunung Kelud dan sebagian kecil dari Gunung Anjasmara dan Gunung Kawi-Butak. Jenis tanah di wilayah Kota Kediri adalah alluvial coklat kelabu dan mediteran.

e. Hidrologi

Kali Brantas yang berada di tengah-tengah kota Kediri, mengalir dari arah selatan ke arah utara. Kota Kediri juga dilalui beberapa sungai yang mengalir menuju Sungai Brantas. Sungai tersebut antara lain :

1. Sungai Kresek sepanjang 5,87 km Kecamatan Pesantren;
2. Sungai Parang 3,00 km Kecamatan Mojoroto;
3. Sungai Kedak 5,84 km Kecamatan Mojoroto;
4. Sungai Ngampel 1,38 km Kecamatan Mojoroto;
5. Sungai Tawang 7,46 km Kecamatan Kota; dan
6. Sungai Bruno 1,93 km Kecamatan Mojoroto

f. Klimatologi

Rata-rata curah hujan di Kota Kediri pada periode 2013-2015 adalah 1.999 mm dimana yang terendah pada tahun 2014 sebesar 1.510. Secara umum curah hujan pada tahun 2015 dengan intensitas rendah terjadi di bulan Mei, Juni, Oktober dan paling rendah bulan agustus, bahkan pada bulan Juli dan September tidak terjadi hujan sama sekali. Hal tersebut bisa dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan & Rata-rata Curah Hujan Tahun 2013- 2015

NO	BULAN	Rata-rata Hari Hujan			Jumlah Curah Hujan di 3 Kecamatan Tahun 2015 (mm)			Rata-rata Curah Hujan (mm)		
		2013	2014	2015	Mojoroto	Kota	Pesantren	2013	2014	2015
1	Januari	19	17	15	268	328	310	510	266	302
2	Pebruari	15	14	15	469	286	277	349	222	344
3	Maret	12	6	18	408	317	385	240	141	370

NO	BULAN	Rata-rata Hari Hujan			Jumlah Curah Hujan di 3 Kecamatan Tahun 2015 (mm)			Rata-rata Curah Hujan (mm)		
		2013	2014	2015	Mojoroto	Kota	Pesantren	2013	2014	2015
4	April	10	10	8	0	198	329	278	215	176
5	Mei	11	5	2	148	0	0	222	90	49
6	Juni	11	5	0	63	0	0	332	58	21
7	Juli	6	1	0	0	0	0	134	6	0
8	Agustus	0	1	0	9	0	0	0	2	3
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	4	0	1	35	0	0	81	0	12
11	November	10	10	7	121	145	196	301	220	154
12	Desember	16	13	12	256	314	254	335	290	275
Jumlah		114	82	78	1.777	1.588	1.751	2.782	1.510	1.706

Sumber : Statistik Hasil Pembangunan Kota Kediri 2016

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kota Kediri bisa dilihat lebih jelas menurut Kecamatan dimana 63% dari Total Lahan di Kecamatan Kota dimanfaatkan untuk perkantoran, perdagangan jasa, industri, pemukiman dan wisata kota, sedangkan sisanya untuk pemanfaatan Persawahan, Fasilitas umum dan sosial serta lahan kosong . Untuk Kecamatan Mojoroto pemanfaatan lahan masih didominasi oleh Persawahan, tanah Kosong dan Hutan sebesar 67,48% sedangkan 32,52% digunakan untuk pendidikan, home industri, industri, pariwisata dan pertanian serta pemukiman. Untuk Kecamatan Pesantren, dominasi penggunaan lahannya sama dengan Kecamatan Mojoroto yaitu sebesar 58,81% dan untuk sisanya dimanfaatkan untuk perkantoran, industri, home industri, permukiman serta pertanian.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Kediri merupakan pusat industri, jasa, perdagangan, pendidikan serta pariwisata secara regional sehingga Kota Kediri memiliki kawasan-kawasan strategis yang dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan potensinya masing-masing, sebagai berikut :

a. Kawasan Khusus Militer, yaitu terdapat :

- 1). Asrama militer yang berlokasi di Kelurahan Bujel;
- 2). Kompleks TNI di Kelurahan Banjaran, Kelurahan Mojoroto, dan Kelurahan Sukorame.

b. Kawasan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan pendorong pertumbuhan ekonomi atau kawasan-kawasan strategis di Kota Kediri yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

1). Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa yang berpotensi untuk dikembangkan adalah pasar induk (Pasar Grosir Ngronggo) yang merupakan pusat kegiatan perdagangan skala besar untuk berbagai komoditas hasil pertanian selain itu di beberapa kawasan Jl. Dhoho, Jl. Pattimura, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Hayam Wuruk (Transmart/Sri Ratu dan Golden) dan daerah Kediri Town Square terdapat pusat perdagangan produk garment, elektronik, kelontong dan sebagainya.

2). Kawasan Industri

Di Kota Kediri pengembangan kawasan industri potensial meliputi industri besar, industri menengah, industri kecil dan home industri. Industri besar yaitu dari industri rokok Gudang Garam di Kelurahan Semampir, Balowerti dan Dandangan serta pabrik gula di Kelurahan Mrican dan Pesantren. Industri sedang berupa industri pengolahan kayu di Kelurahan Pesantren dan industri pembuatan makanan di Kelurahan Betet dan Kelurahan Blabak. Industri kecil, khususnya tahu tersebar di beberapa wilayah kota Kediri. Home industri berada di Kelurahan Bandar Kidul, Bandar Lor, Banjarmlati, Pakelan, Blabak dan Kampung Dalem.

3). Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata di Kota Kediri didukung oleh banyaknya hotel berbintang serta beberapa penginapan yang tersebar di wilayah Kota Kediri. Pengembangan kawasan tersebut meliputi pariwisata industri; pariwisata belanja dan kuliner; serta pariwisata olah raga dan seni. Pariwisata industri merupakan kegiatan pariwisata untuk melihat proses produksi industri besar, sedang, kecil maupun home industri. Untuk pariwisata Belanja dan Kuliner berpusat di Jalan Dhoho dan sekitarnya.

c. Kawasan Pengembangan Sosial Budaya

Kawasan di Kota Kediri yang potensial untuk pengembangan sosial budaya yaitu merupakan kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya dan kawasan pusat pendidikan, antara lain :

1). Kawasan Goa Selomangleng

Merupakan kawasan yang dikembangkan sebagai wisata alam dan perlindungan terhadap peninggalan bersejarah.

2). Kawasan Makam Kuno

Peninggalan budaya berupa situs makam kuno yang perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan sebagai kawasan wisata religi, yaitu Makam Sunan Geseng, Kompleks Makam Islam Mbah Wasil, Makam Kuno Mbah Boncolono dan berbagai macam ziarah makam islam lainnya.

3). Kawasan Pendidikan

Pengembangan kawasan pendidikan diutamakan di bagian barat wilayah Kota Kediri, terdiri dari pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.

d. Kawasan Pendukung Lingkungan Hidup

1). Kawasan Resapan Air

Di Kota Kediri terdapat kawasan resapan air, yaitu merupakan kawasan yang memiliki resapan air hujan yang tinggi sehingga menjadi tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai penyedia sumber air. Kawasan ini terdapat di Kecamatan Pesantren yaitu Kelurahan Betet, Pakunden dan Jamsaren serta di Kecamatan Mojoroto yaitu Kelurahan Pojok dan sebagian besar merupakan kawasan lahan pertanian dan hutan yang perlu dilestarikan untuk menjaga kemampuan resapan air.

2). Kawasan Perlindungan Setempat

Beberapa mata air dan sungai di Kota Kediri berfungsi sebagai sumber air bersih maupun drainase. Untuk melindungi kelestarian mata air dan sungai diperlukan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan mata air dan sempadan sungai. Wilayah tersebut tersebar di Kecamatan Mojoroto yaitu di Kelurahan Pojok dan Gayam; Kecamatan Kota berada di Kelurahan Ngadirejo, Rejomulyo dan Banjaran; serta Kecamatan Pesantren tepatnya di Kelurahan Singonegaran, Blabak dan Betet.

3). Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota perlu dipertahankan keberadaannya minimal 30% (20% dari luas kawasan perkotaan yaitu 61,54 Km² RTH publik dan 10% RTH privat).

Pada tahun 2016, ruang terbuka hijau (RTH) Publik di Kota Kediri mencapai 524,32 Ha atau 8,52% dari luas wilayah. Luasan RTH publik yang ada dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Luas Eksisting RTH Kota Kediri

No.	RTH	Luas (Ha)	%
1	Tempat Rekreasi	12	0,19%
2	Hutan Kota	309	5,02%
3	Makam	59,2789	0,96%
4	Sempadan Sungai	34	0,55%
5	Jalur Hijau	16	0,26%
6	Pulau dan Median	8,5	0,14%
7	Kebun Bibit	15	0,24%
8	Sempadan Rel	10	0,16%
9	Taman-taman di Kota Kediri	41,6955	0,68%
10	Taman Kediri Memorial Park Depan Taman Makam Pahlawan	0,24	0,00%
11	Perluasan Taman Ngronggo	1,02	0,02%
12	Taman Tempurejo	1,67	0,03%
13	Eks Lokalisasi Semampir	1,3	0,02%
14	Sumber Mata Air	14,9193	0,24%
LUAS		524,3237	8,52%

Sumber : DKP Kota Kediri

Ruang terbuka hijau taman kota tersebar di beberapa Tempat antara lain : Taman Alun-alun, Taman dan Lapangan Brawijaya, Taman Sekartaji, Taman Pancasila, Taman Sudanco Supriyadi, Taman Selatan Pembantu Gubernur, Taman Air Mancur, Taman Monumen dan Peta Relief, Taman Bahagia Kelurahan Jamsaren, Taman Gapensi, Taman Ngronggo, Taman Tempurejo. Lahan pertanian berupa sawah di Kota Kediri seluas 2.230,50 juga sebagai penyedia ruang terbuka hijau kota yang keberadaannya harus dipertahankan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) minimal 500 ha.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang rawan terjadi di wilayah Kota Kediri meliputi kebakaran, banjir dan erosi. Kawasan rawan bencana kebakaran di Kota Kediri terdapat di Kelurahan Dandangan, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Kemas, Kelurahan Setono Pande, Kelurahan Ringin Anom, dan Kelurahan Bandar Lor.

Sedangkan kawasan rawan bencana banjir di Kota Kediri yaitu Kelurahan Balowerti, Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Balowerti, dan Kelurahan Kaliombo, Kelurahan Jamsaren, Kelurahan Setono Pande, wilayah Ngadisimo serta Kelurahan Mojoroto. Untuk kawasan rawan bencana erosi di Kota Kediri ada di wilayah Kecamatan Mojoroto bagian barat.

2.1.4 Demografi

a. Jumlah Penduduk

Kota Kediri pada tahun 2016 jumlah penduduknya mengalami kenaikan sebesar 2.554 dibanding jumlah penduduk tahun 2015, dimana pada tahun 2016 sebanyak 315.553 jiwa dan pada tahun 2015 sebanyak 312.999. Komposisi penduduk Kota Kediri dari Tahun 2012-2016 menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Kediri Tahun 2012-2016

Kelompok Umur	2012	2013	2014	2015	2016
0 – 4	15.700	20.233	20.233	20.788	20.431
5 – 9	21.466	23.209	23.209	24.502	24.386
10 – 14	23.312	23.273	23.273	24.709	24.947
15 – 19	21.452	18.602	20.203	22.145	22.584
20 – 24	22.319	18.508	20.083	20.875	21.220
25 – 29	28.443	22.346	23.282	23.029	22.213
30 – 34	30.148	26.094	28.715	29.667	28.525
35 – 39	25.592	22.166	24.779	27.069	27.607
40 – 44	23.978	20.581	22.433	23.778	24.272
45 – 49	19.543	19.022	21.182	21989	22.525
50 – 54	19.543	16.856	18.347	20.206	20.530
55 – 59	15.458	13.967	15.723	17.405	17.649
60 – 64	10.785	9.348	10.555	12.590	13.132
>65	22.279	18.727	21.165	24.247	25.532
JUMLAH	312.331	267.310	293.282	312.999	315.553

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri

Tingkat kepadatan penduduk Kota Kediri tertinggi pada tahun 2016 di Kecamatan Mojoroto dan yang terendah di Kecamatan Pesantren. Laju pertumbuhan penduduk Kota Kediri pada tahun 2016 mengalami

perlambatan dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh faktor relatif menurunnya angka kelahiran dan faktor migrasi penduduk dari luar kota yang masuk ke Kota Kediri. Menurunnya faktor migrasi penduduk dari luar kota disebabkan karena daerah lain disekitar Kediri mulai berbenah disektor industry dan perdagangan yang menyerap banyak tenaga kerja.

Di Kota Kediri Tahun 2016 jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) relatif tinggi yaitu berjumlah 220.257 orang atau sekitar 69,8% dibandingkan dengan besaran penduduk pada usia non produktif yang hanya 30,2%.

Salah satu indikator demografi yang penting yaitu tingkat ketergantungan. Semakin tinggi tingkat ketergantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Diketahui bahwa tingkat ketergantungan di Kota Kediri relative mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana kenaikan yang paling tinggi pada tahun 2012 dari 0.36 menjadi 0.469 pada tahun 2013, namun pada tahun 2014 rasio ketergantungan menurun sebesar 0.427 serta mengalami peningkatan lagi pada tahun 2015-2016 rata-rata sebesar 0.002. Data tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2016 setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif dan atau tidak produktif.

Dari sisi keagamaan, sebagian besar penduduk Kota Kediri beragama islam yaitu sebesar 91,37%, sedangkan yang beragama Kristen 5,74%, Katholik (2,34%), dan Budha (0,42%) selebihnya beragama Hidhu dan khonghuchu dan penganut kepercayaan. Adapun jumlah penduduk menurut agama sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2015

No.	Kecamatan	AGAMA						Jumlah
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Khonghucu/ Penghayat Kepercayaan	
1	Mojoaroto	114.007	3.441	2.695	136	87	22	120.388
2	Kota	85.034	9.575	3.657	78	1.044	93	99.481
3	Pesantren	86.937	4.945	978	52	181	37	93.130
Jumlah		285.978	17.961	7.330	266	1.312	152	312.999

Sumber : Dispendukcapil Kota Kediri

b. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator utama ukuran kualitas manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata penduduk mencerminkan semakin tingginya kualitas manusia. Tingkat pendidikan penduduk terbesar di Kota Kediri pada tahun 2015 adalah setingkat SMA. Salah satu unsur data indeks pendidikan tersebut menunjukkan bahwa kualitas kehidupan manusia di Kota Kediri relatif baik untuk menjadi modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Perbandingan komposisi penduduk Kota Kediri menurut jenjang pendidikan pada tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Komposisi Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Strata III	52	53	53	54	58
2	Strata II	1.484	1.571	1.571	1.651	1.759
3	Diploma IV / Strata I	19.856	22.058	22.058	23.917	24.796
4	Akademi / D- III / Sarjana	4.232	6.956	6.956	7.346	7.431
5	Diploma I / II	2.149				
6	SMA / Sederajat	76.862	83.946	83.946	89.640	91.323
7	SMP / Sederajat	42.583	46.935	46.935	50.310	50.623
8	Tamat SD / Sederajat	49.172	52.959	52.959	55.201	54.408
9	Belum Tamat SD/Sederajat	27.693	78.804	78.804	84.880	85.155
10	Tidak / Belum Sekolah	43.227				
JUMLAH		312.331	267.310	293.282	312.999	315.553

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang hendaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai pemerataan kesejahteraan masyarakat.

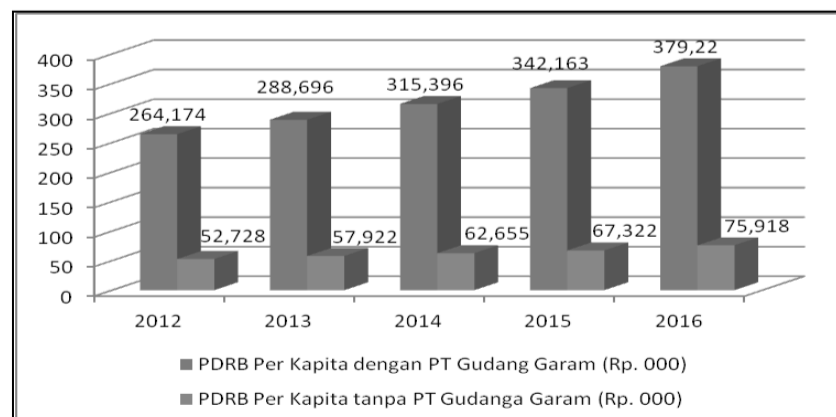
a. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita

Pendapatan PDRB per kapita bermanfaat sebagai indikator standar hidup atau kesejahteraan suatu daerah dari tahun ke tahun, menjadi pembanding kesejahteraan antar daerah, serta digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan ekonomi daerah.

Berdasarkan grafik 2.1, sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 nilai PDRB per Kapita ADHB Kota Kediri terus mengalami peningkatan, baik PDRB dengan PT. Gudang Garam Tbk atau tanpa PT. Gudang Garam Tbk. Untuk PDRB per kapita ADHB dengan PT. Gudang Garam Tbk mulai tahun 2012 sebesar Rp.264.173.727,00; tahun 2013 sebesar Rp.288.696.230,00; tahun 2014 Rp.315.396.104,00; tahun 2015 sebesar Rp.342.162.681,00 dan tahun 2016 sebesar Rp.379.220.238,00.

Meningkatnya nilai PDRB per Kapita tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kesejahteraan masyarakat Kota Kediri semakin meningkat. Lebih jelasnya dapat dipahami grafik berikut ini :

Grafik 2.1
Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB Kota Kediri Tahun 2012 – 2016 (Rp Ribu)



Sumber : BPS Kota Kediri

Sedangkan PDRB per Kapita ADHB tanpa PT Gudang Garam Tbk juga mengalami peningkatan, tahu 2012-2016 berturut-turut : Rp.52.727.876,00; Rp.57.921.950,00; Rp.62.654.876,00; Rp.67.321.628,00 dan Rp.75.918.472,00.

b. Kemiskinan

Berdasarkan data Susenas dari BPS Kota Kediri, mulai tahun 2011-2015 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7
Indikator Kemiskinan di Kota Kediri

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	23.300	22.100	22.700	22.130	23.770
Persentase Penduduk Miskin	8,63 %	8,14 %	8,23%	7,95	8,51
Tingkat Kemiskinan (p0)	0,09	0,08			
Indeks Kedalaman Kemiskinan (p1)	1,57	0,82	1,61	0,91	1,40
Indeks Keparahan Kemiskinan (p2)	0,45	0,14	0,47	0,17	0,43

Sumber : BPS, Hasil Pengolahan Susenas 2011-2015

Sesuai data di atas diketahui bahwa penduduk miskin di Kota Kediri masih sekitar 8,51%, sehingga perlu optimalisasi pelaksanaan program-program pembangunan yang *pro-poor* dan mengarah pada rumah tangga miskin yang merupakan pendorong utama keberhasilan pemerintah Kota Kediri dalam menurunkan jumlah penduduk miskin yang ada. Program-program tersebut diantaranya adalah distribusi sembako, pembangunan prasarana fisik seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), bantuan pendidikan, maupun bantuan modal usaha dan pinjaman modal bergulir dalam upaya menumbuhkan ekonomi produktif dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kualitas bagi seseorang baik secara individu maupun dalam kelompok masyarakat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi melainkan juga dari sisi kesejahteraan

sosial. Indikator sosial yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas seseorang antara lain pendidikan dan Kesehatan, indikator ini dijabarkan sebagai berikut :

a. Pendidikan

1). Angka melek huruf

Indikator terlaksananya pendidikan dengan baik untuk masyarakat diketahui dengan meningkatnya angka melek huruf atau kemampuan baca tulis dalam masyarakat tersebut.

Tabel 2.8
Angka Melek Huruf

Tahun	Target	Penduduk 15 th yg dpt baca tulis	Penduduk Usia ≥15	%	Capaian Kinerja
2012	99	217.288	222.948	97.46	99.44
2013	99	196.889	197.794	99.54	100.54
2014	100	209.374	209.374	100	100
2015	100	241.950	241.950	100	100
2016	100	244.383	244.383	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri

Tabel diatas menunjukkan perkembangan angka melek huruf selama tahun 2012-2016 yang cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan karena, berhasilnya program pendidikan, tingginya kesadaran masyarakat untuk dapat membaca dan menulis, semakin efektifnya kelompok belajar masyarakat, dan meningkatnya layanan taman bacaan.

2). Angka rata-rata lama sekolah

Peningkatan kualitas belajar mengajar yang lebih baik serta peningkatan kualitas sarana- prasarana pendidikan yang memadai telah diupayakan oleh Kota Kediri. Pada tahun 2016, angka rata-rata lama sekolah mencapai sebesar 10,26 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa seluruh penduduk Kota Kediri telah menempuh pendidikan dasar 9 tahun dan kualitas pendidikan Kota Kediri berada pada tingkatan diatas rata-rata.

3). Angka Partisipasi Kasar (APK)

Diukur dengan membandingkan jumlah total siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dengan jumlah anak yang bersekolah (usia 7-12; 13-15; 16-18 tahun) pada periode waktu tertentu.

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Perkembangan APK pada masing-masing jenjang pendidikan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Jenjang Pendidikan	Tahun	APK
SD/MI	2012	116,01
	2013	108,77
	2014	125,81
	2015	112,45
	2016	111,87
SMP/MTs	2012	144,44
	2013	133,67
	2014	154,01
	2015	131,61
	2016	131,34
SMA/MA/ SMK	2012	256,67
	2013	234,55
	2014	260,55
	2015	244,44
	2016	222,31

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, LKPJ 2016

4). Angka Partisipasi Murni (APM)

Diukur dengan dengan membandingkan jumlah siswa usia sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK) dengan jumlah penduduk usia sekolah (7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun) pada periode yang sama.

APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM di Kota Kediri untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah rata-rata melebihi 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat baik dari Kota Kediri maupun dari luar Kota Kediri terhadap pendidikan di Kota Kediri sangat tinggi, sehingga program

peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan perlu dilaksanakan diantaranya melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai bagi penduduk Kota Kediri dan masyarakat umum.

Dengan capaian rata-rata APK dan APM yang tinggi di Kota Kediri menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota Kediri semakin baik, penduduk usia sekolah di Kota Kediri dapat tertampung di lembaga pendidikan yang ada, serta semakin meningkatnya minat warga masyarakat luar kota untuk memperoleh pendidikan di Kota Kediri. Hal tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas belajar mengajar yang lebih baik serta kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan yang memadai, agar citra Kota Kediri sebagai pusat pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan.

Capaian APM di Kota Kediri di masing-masing jenjang pendidikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

Jenjang Pendidikan	Tahun	APM (%)
SD/MI (7 - 12)	2012	106,35
	2013	98,82
	2014	117,30
	2015	102,95
	2016	104,53
SMP/MTs (13 - 15)	2012	103,05
	2013	102,90
	2014	121,18
	2015	103,33
	2016	102,46
SMA/MA/ SMK (16 - 18)	2012	195,44
	2013	170,60
	2014	191,93
	2015	180,53
	2016	162,52

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri

b. Kesehatan

Indikator terlaksananya pelayanan kesehatan dengan baik untuk masyarakat dapat diketahui dengan meningkatnya angka harapan hidup, penurunan angka

kematian bayi dan angka kelangsungan hidup bayi yang rendah.

Tabel 2.11
**Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat
 Indikator Kesehatan Kota Kediri Tahun 2010-2015**

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi per seribu kelahiran	988	990,78	991,65	994,95	975.00	1000
2.	Angka Kematian Bayi per seribu kelahiran hidup	12,00	9,22	8,35	5,02	5.22	5.30
	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun pada tahun x	41	34	32	27	25	23
	Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun x	3.416	3.684	3.830	5.342	4.793	4.277
3.	Angka Kematian Ibu per Seratus ribu kelahiran hidup		108	183	74,88	83.46	70.14
4.	Persentase Gizi Buruk (%)	0,023	0,046	0,092	0,034	0.042	0.036
	Jumlah Balita	17.149	21.815	18.525	23.268	23.659	17.128
	Balita dengan Gizi Buruk	4	10	17	8	10	6
5.	Angka Harapan Hidup	70,41	70,64	70,78	70,79*	71	

*) : angka sementara

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri ; BPS Prov. Jatim

Pemerintah Kota Kediri menetapkan sasaran prioritas yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan urusan kesehatan yaitu meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya akses, mutu pelayanan kesehatan dan perilaku hidup sehat; serta meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan.

Kinerja keberhasilan pelayanan bidang kesehatan antara lain, tidak terdapat masyarakat di wilayah kecamatan yang rawan gizi, hampir semua masyarakat di wilayah kelurahan (100%) dan telah menggunakan garam beryodium baik. Semakin membaiknya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan ditingkatkannya pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan di puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, serta pengadaan sarana dan prasarana di rumah sakit yang didukung dengan perbaikan sarana pelayanan kesehatan di masing-masing kelurahan melalui ponkeskel maupun puskesmas pembantu.

Dalam pelaksanaan tindakan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, antara lain tampak dari tertanganinya kasus-kasus KLB yang terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam.

Pelayanan kesehatan gratis di sarana pelayanan kesehatan dasar dan rawat jalan serta rawat inap gratis mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya program BPJS sehingga penduduk lebih memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan di RS, fasilitas yang memadai, pelayanan yang profesional, ditunjang SDM yang berkualitas.

Disisi lain, peningkatan peran serta masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup sehat menuju terwujudnya keluarga berkualitas tercermin dari meningkatnya jumlah posyandu yang ada di Kota Kediri yaitu pada tahun 2016 terdapat 336 posyandu dengan jumlah balita 18.210 atau rasio jumlah posyandu dibanding jumlah balita (1:54). Dari jumlah tersebut yang termasuk posyandu purnama sebanyak 253 (75.07%), dan 37 posyandu mandiri (11,01%), dan posyandu madya 46 (13,69). Revitalisasi peran posyandu di setiap kelurahan ditingkatkan dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta memotivasi kader kesehatan yang diintegrasikan melalui posyandu gerdu sehat.

Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (IMR) di Kota Kediri mengalami penurunan dari tahun ke tahun (Berdasarkan data BPS Propinsi Jawa Timur). Kemudian trend perkembangan angka harapan hidup penduduk Kota Kediri cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 angka harapan hidup penduduk kota kediri hampir mencapai 73,62 dibandingkan pada tahun 2009 dengan angka harapan hidup sekitar 70,18 tahun.

c. Ketenagakerjaan

Untuk kesejahteraan, semakin tinggi rasio penduduk yang bekerja maka semakin sejahtera penduduk di wilayah tersebut. Rasio Penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja, Rasio dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.12
Rasio Penduduk Bekerja Kota Kediri Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angkatan Kerja	134.276	139.756	138.590	135.579	145.426	142.628
2.	Rasio	0,66	0,66	0,67	0,65	0,68	0,66

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Kediri tahun 2015 sebesar 8,64%, meningkat dari tahun 2014 yang sebesar 7,66%. Salah satu faktor penyebab naiknya jumlah pengangguran adalah terjadinya PHK atau program pensiun dini yang dilakukan oleh PT. Gudang Garam Tbk., dimana banyak penduduk Kota Kediri yang bekerja dan menggantungkan pekerjaan dari keberadaan pabrik rokok tersebut.

Namun demikian, kesejahteraan pekerja di Kota Kediri terus mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Kediri dari tahun ke tahun. Kenaikan UMK ini bisa dilihat pada data yang menunjukkan bahwa tren peningkatan UMK terjadi sejak tahun 2012 yaitu masih sebesar Rp.1.037.500,00 yang pada tahun 2015 sudah menjadi sebesar Rp.1.339.750,00 dan naik lagi menjadi Rp.1.494.000,00 pada tahun 2016.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Diantara kebutuhan manusia adalah mengapresiasi seni budaya dan olahraga sehingga perlu adanya pembangunan seni budaya olahraga dalam rangka

peningkatan kualitas Sumber Daya Insani, yang diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi.

a. Kebudayaan

Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya diperlukan sebagai upaya melestarikan nilai-nilai tradisi dan budaya adat masyarakat serta pengembangan kesenian daerah sekaligus menjadi daya tarik wisata daerah. Jumlah kelompok kesenian yang dibina menunjukkan peningkatan dari 42 kelompok kesenian yang dibina pada tahun 2012 meningkat menjadi 202 kelompok kesenian yang dibina pada tahun 2016.

Tabel 2.13
**Perkembangan Seni, Budaya
 Tahun 2010 s.d 2016**

No	Capaian Pembangunan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kelompok Kesenian	157	106	70	70	143	146	202
2	Jumlah Kelompok Kesenian yang dibina	32	34	42	47	143	146	202

Sumber : Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda & Olahraga Kota Kediri

Potensi Seni Budaya yang terdapat di Kota Kediri antara lain berupa Lembaga Pendidikan Seni (4); Gedung Pertunjukan (2); Museum (1); Gedung Bersejarah (1); dan Benda Cagar Budaya (10).

b. Olahraga

KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Kediri sebagai organisasi yang melakukan koordinasi bidang olahraga dibantu dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Kediri terus memberikan pembinaan pada berbagai cabang olah raga. Capaian pembangunan olahraga dalam kurun lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14
**Capaian Pembangunan di bidang Olahraga
Tahun 2011 s.d 2016**

No	Capaian Pembangunan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Fasilitas Olahraga :						
	Gedung Olahraga	48	48	48	48	48	48
	Lapangan Olahraga	20	20	20	20	20	20
2	Klub Olah Raga yang Ada	181	181	181	181	181	181

Sumber : Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda & Olahraga Kota Kediri

c. Pariwisata

Jumlah kunjungan wisata tahun 2015 sebanyak 264.647 orang, sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 273.564 orang dengan potensi obyek wisata sebanyak 6 buah. dan jumlah kelompok penduduk bergerak dibidang wisata sebanyak 31 kelompok.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, maka pemerintah Kota Kediri dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipatif, transparansi, kesetaraan, responsive, visioner, akuntabel, efisien dan efektif serta profesional.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan tahun 2016 menunjukkan kinerja yang baik dalam pengembangan mutu sumber daya pendidikan, pemerataan, maupun perluasan pendidikan, seperti tercermin dari capaian angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni dan tingkat kelulusan yang semakin tinggi.

Kinerja meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan secara makro dapat dilihat dari capaian Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

a). Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah diukur dengan menghitung jumlah murid kelompok usia sekolah dibanding jumlah penduduk kelompok usia sekolah dikalikan dengan 1000 dan merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

b). Ketersediaan Sekolah

Capaian rata-rata Angka Melek Huruf, APK dan APM yang tinggi di Kota Kediri menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota Kediri semakin baik, penduduk usia sekolah di Kota Kediri dapat tertampung di lembaga pendidikan yang ada, serta semakin meningkatnya minat masyarakat luar kota untuk memperoleh pendidikan di Kota Kediri, hal ini disebabkan jumlah fasilitas pendidikan sampai dengan tahun 2016 sudah merata disemua jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Fasilitas pendidikan di Kota Kediri sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.15
**Jumlah Fasilitas/Lembaga Pendidikan
di Kota Kediri Tahun 2016**

Tingkat	Negeri	Swasta	Luar Biasa	Terbuka
SD/MI	118	32	2	-
SMP/MTs	11	27	1	-
SMA	10	15	2	-
SMK	3	23	-	-
TOTAL	142	97	5	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri

Pemerintah Kota Kediri memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan secara berkelanjutan. Pembangunan pendidikan di Kota Kediri difokuskan pada dua hal yaitu pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam hal pemerataan kesempatan belajar, kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan menjadi titik fokus utama, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kota Kediri, termasuk pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Serta melalui rehabilitasi gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah dan bantuan biaya pendidikan. Ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel 2.16
**Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2012-2016**

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	155	155	155	156	157
1.2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	28.283	30.439	23.273	29.928	29.788
1.3	Rasio	1:183	1:183	1:196	1:192	1:190
1.4	Prosentase Kondisi bangunan baik	94,16	96,77	100	78,08	
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	37	36	37	39	38
2.2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15thn	12.013	11.996	13.417	14.546	14.807
2.3	Rasio	1:286	1:324	1:373	1:373	1:390
2.4	Prosentase Kondisi bangunan baik	88,10	100	100	97,13	
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah gedung sekolah	51	51	51	51	51
3.2	jumlah penduduk kelompok usia 16-18thn	12.200	11.930	13.182	12.659	13.284
3.3	Rasio	1:226	1:234	1:258	1:248	1:260
3.4	Prosentase Kondisi bangunan baik	92,59	100	100	92,79	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah gedung sekolah pada jenjang SD/MI dari tahun 2015-2016 mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan ada penambahan 1 SD swasta yang berada di Kecamatan Kota.

c). Rasio Guru Murid dan Rasio Guru Kelas

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu kualitas hasil anak didik, dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana penunjang belajar seperti buku, laboratorium dan ruang praktik, optimalisasi manajemen sekolah, serta peningkatan metodologi pembelajaran. Rasio jumlah guru dan murid di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.17
**Rasio Guru Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2012- 2016**

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	2032	1814	1773	1793	1797
1.2.	Jumlah Murid	32.811	33.110	32.960	33.653	33,688
1.3.	Jumlah Kelas	980	1002	1.053	1.029	1.102
1.4.	Rasio Guru Murid (1: ..)	16	18	17	19	19
1.5.	Rasio Kelas Murid (1: ..)	33	33	32	33	31
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	1224	1206	1206	1215	1162
2.2.	Jumlah Murid	17.325	17.943	18.433	19.144	19,029
2.3.	Jumlah Kelas	478	495	1.004	557	574
2.4.	Rasio Guru Murid (1: ..)	14	15	15	16	16
2.5.	Rasio Kelas Murid (1: ..)	36	36	55	34	33
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah Guru	2.288	2.220	2.301	2189	2122
3.2.	Jumlah Murid	30.639	30.896	29.580	30.944	30,857
3.3.	Jumlah Kelas	677	726	890	804	918
3.4.	Rasio Guru Murid (1: ..)	13	14	25	14	15
3.5.	Rasio Kelas Murid (1: ..)	45	42	30	38	34

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa rasio jumlah guru dan murid pada jenjang SD pada tahun 2016 yaitu 1:19 yang artinya 1 orang guru menangani 19 siswa, Namun rasio jumlah kelas

menurun dari tahun sebelumnya yaitu 1:31 artinya jumlah kelas dapat di tempati oleh 31 siswa. Sedangkan rasio jumlah guru dan murid pada jenjang SMP/MTs tahun 2015 adalah 1:16 dan rasio kelas 1:33. Untuk tingkat SMA/MA/SMK di tahun 2016, 1 guru menangani 15 siswa dengan rasio kelas 34 siswa.

d). Angka Kelulusan

Angka Kelulusan diukur dengan membandingkan jumlah siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang lulus dengan jumlah total siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang mengikuti ujian pada tahun yang sama. Angka Kelulusan Siswa SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA dan SMK pada tahun 2012-2016 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.18
**Angka Kelulusan per jenjang pendidikan
 Tahun 2012-2016**

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	AK SD/MI	100	99,59	99,86	100	100
2.	AK SMP/MTs	99,77	99,89	99,63	100	100
3.	AK SMA/MA/SMK	96,46	96,74	99,40	99,72	99,73

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum Angka Kelulusan Siswa pada tahun 2012-2016 berada pada level memuaskan. Realisasi angka kelulusan siswa untuk jenjang SMP/MTs menunjukkan adanya kestabilan, dimana siswa SMP/MTs yang lulus pada tahun 2016 sebesar 100%. Sementara untuk jenjang SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016 rata-rata sebesar 0,054% Berbeda halnya pada jenjang SD/MI, kinerja angka kelulusan siswa pada umumnya tidak mengalami perubahan yang cukup berarti yaitu berkisar 100%.

Angka kelulusan siswa di Kota Kediri relatif stabil karena didorong oleh adanya kerjasama yang baik antara manajemen sekolah, orang tua, dan murid untuk terus memotivasi siswa dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar disamping siswa semakin memiliki kesadaran yang tinggi untuk memacu prestasi belajarnya.

e). Guru yang berkualifikasi S1/D-IV

Realisasi guru sesuai kualifikasi S1/D4 pada tahun 2016 sebesar 86,76%, yaitu dari 5.920 guru yang ada di Kota Kediri sebanyak 5.136 guru telah memiliki ijazah S1/D4, namun pemenuhan guru yang memiliki ijazah minimal S1/D4 harus terus mendapatkan perhatian. Hal ini melihat perkembangan guru berkualifikasi S1/D4 mengalami penurunan secara kuantitas sebanyak 366 guru dibanding tahun 2015 dengan jumlah guru berkualifikasi sebanyak 5.502 orang dari 5.902 guru yang ada. Penurunan ini disebabkan karena adanya jumlah guru yang memasuki masa pensiun dan meninggal dunia yakni sejumlah 209 orang, selain itu penurunan jumlah guru berkualifikasi S1/D4 juga disebabkan karena adanya lembaga baru yang beroperasi di tahun 2016 yang sebagian tenaga pengajarnya belum menuntaskan pendidikan S1/D4.

Oleh karena itu peningkatan motivasi kepada guru perlu terus dilakukan antara lain melalui Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sehingga seluruh guru di Kota Kediri dapat memenuhi standar pelayanan pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu kualifikasi akademik guru minimal harus berijazah S1/D4. Presentase jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4 dari tahun 2012-2016 bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.19
**Presentase guru yang berkualifikasi S1/D-IV
per jenjang pendidikan di Kota Kediri**

No	Jenjang sekolah	2012	2013	2014	2015	2016
1.	SD/MI	71.16	81.93	88.78	93.22	86.76
2.	SMP/MTs	95.30	98.33	97.84		
3.	SMA/SMK/MA	95.81	98.45	97.79		

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri

f). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan usia dini merupakan pondasi utama dalam dunia pendidikan. Bentuk dukungan Pemerintah Kota Kediri juga diberikan melalui bantuan dana dan insentif tutor PAUD yang setiap tahun diberikan, serta penyediaan APE dan sarana prasarana pendukung untuk menunjang kegiatan bermain dan belajar para peserta PAUD. Perkembangan PAUD di Kota Kediri dapat diketahui dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.20
Pendidikan Anak Usia Dini

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah TK/RA	134	242	137	111
2.	Jumlah Siswa	10.365	10.518	10.245	8170
3.	Siswa usia 5-6 Tahun	7.306		7.373	9.356

Sumber : Buku Dapodik, Dinas Pendidikan Kota Kediri

2. Kesehatan

Pada tahun 2016 dari 12 RS yang ada di Kota Kediri dengan 8 Rumah Sakit telah menyediakan empat layanan kesehatan spesialis dasar yang didukung oleh tenaga kesehatan yang memadai di Kota Kediri. Ketersediaan tenaga kesehatan pada tahun 2016 terdiri : 323 dokter, 255 bidan, 860 perawat, 138 dokter gigi, 133 Apoteker, 176 asisten apoteker, 24 sanitarian, dan 30 nutrisian.

Cakupan jumlah penduduk miskin yang dapat dilayani dengan pengobatan gratis melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas, Jamkesda, BPJS) terus ditingkatkan, dari

37.814 jiwa pada tahun 2008 menjadi 123.431 pada tahun 2016. Sebanyak 123.431 penduduk miskin pada tahun 2016 semuanya tercakup dalam Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang dilaksanakan melalui Jamkesmas dan Jamkesda.

Secara lebih lengkap mengenai perkembangan sarana kesehatan di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21
**Perkembangan Sarana Kesehatan Kota Kediri
 Tahun 2011-2016**

	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio Posyandu per satuan Balita	1,43	1,43	1,66	1:50	1:54
2.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,03	0,03	0,01	0,03	0,03
3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
4.	Rasio dokter per satuan penduduk	1,11	1,94	1,77		1,46
5.	Rasio Tenaga Kesehatan / satuan penduduk	3,66				
	Bidan	0,44	0,51	0,47		0,61
	Perawat	0,92	0,31	0,36		1,09
	Dokter gigi	0,31	0,56	0,93	0,97	1,31
	Apoteker	4,81	5,10	7,74		6,32
	Assisten apoteker	5,75	4,96	6,43		5,58
	Sanitarian	1,25	1,22	1,20		1,52
	Nutrision	0,60	0,57	0,36		0,48
6.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	-	98,4	83,9		100
7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	-	98,8	100,4	93,2	100
8.	Cakupan Kelurahan UCI	100	100	100	100	91,3
9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
10.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	80,85	79,4	86,4	100	100
11.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100
12.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	91,39	100	86,4	100	100
13.	Cakupan Kunjungan Bayi	99,38	93,09	99,7	94,2	92,01
14.	Cakupan Puskesmas	300	300	300		
15.	Cakupan Pembantu puskesmas	21,74	21,74	21,74		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a). Jalan

Ketersediaan infrastruktur jalan yang baik akan memberikan keamanan, kenyamanan dan kemudahan yang mendorong terjadinya saling interaksi, integrasi dan konektivitas menuju pusat-pusat aktivitas ekonomi serta memperluas aksesibilitas untuk memperoleh pelayanan umum administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan dan sosial kemasyarakatan yang pada akhirnya akan mempercepat peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Tabel 2.22
**Pembangunan Transportasi Jalan
Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dlm kondisi baik (%)	70,39	71,50	84,62	87,32	85,38
2.	Panjang jalan kondisi baik (km)	233.099	236.920	282.745	292.740	286.249
3	Panjang jalan seluruhnya (km)	331.167	331.345	334.097	335.249	335.264

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri

Secara garis besar total panjang jalan kondisi baik, telah terjadi peningkatan dari 70,39% pada tahun 2012 menjadi 85,38% di tahun 2016. Meskipun proporsi jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan, namun secara bertahap panjang jalan kondisi baik harus terus ditingkatkan untuk menunjang tingginya aktivitas perekonomian masyarakat.

b). Prasarana Sumber Daya Air

Pengelolaan prasarana sumber daya air meliputi pengelolaan wilayah sungai, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air bersih serta pengendalian banjir. Sistem jaringan prasarana sumber daya air diarahkan

untuk pengembangan pengairan berdasarkan Wilayah Sungai (WS) Brantas. Sedangkan pengelolaan prasarana sumberdaya air baku untuk air bersih, diarahkan mengembangkan pada sumber-sumber mata air yang ada yaitu : Sumber Mata Air Sendang Kembar di Kelurahan Gayam; Sumber Mata air Njiput di Kelurahan Rejomulyo; Sumber Mata air Sendang Ngembak; Sumber Mata air Cakarsi di Kelurahan Tosaren; Sumber Mata air Sumber Bulus di Kelurahan Tosaren; dan Sumber Rempi di Kelurahan Betet.

c). Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Berdasarkan data Susenas 2016, rumah tangga di Kota Kediri yang bersanitasi sebesar 99,23%. Tingginya rumah tinggal yang bersanitasi menunjukkan bahwa semakin meningkat pula kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Peningkatan ini di dorong pula oleh Keikutsertaan Kota Kediri dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Program SANIMAS dan IPAL Komunal sebagai salah satu upaya penyehatan lingkungan di bidang permukiman.

Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi menyebabkan jumlah Rumah Tangga yang bersanitasi belum maksimal antara lain masih minimnya data rumah tangga bersanitasi serta definisi sanitasi sehat yang bervariasi yang dikeluarkan oleh beberapa Kementerian.

Ke depan beberapa langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar penanganan sanitasi dapat dilakukan secara menyeluruh, antara lain :

- 1). Diperlukan persamaan persepsi terhadap definisi sanitasi, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara holistic;
- 2). Perlu dilakukan koordinasi dan pendataan sanitasi guna mendapatkan data yang lebih akurat berdasarkan kriteria yang disepakati bersama.

Selain itu diperlukan upaya-upaya guna pemenuhan *Readinesss Criteria*, mengingat Pemerintah Pusat menyediakan anggaran yang besar untuk penanganan Sanitasi yang merupakan salah satu target RPJMN 2014-2019, yaitu 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi). Untuk perkembangan jumlah Rumah Tangga bersanitasi di Kota Kediri tahun 2012-2016.

Tabel 2.23
**Persentase Rumah Tangga Berdasar Penggunaan Fasilitas
 Tempat Buang Air Besar di Kota Kediri**

Tahun	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada	Jumlah	RT
2012	80,12%	15,17%	3,13%	1,58%	100%	73.377
2013	78,66%	14,81%	6,03%	0,50%	100%	72.271
2014	81,21%	15,80%	1,56%	1,43%	100%	72.650
2015	80,17%	14,56%	4,10%	1,17%	100%	73.155
2016	84,90%	12,86%	1,47%	0,77%	100%	73.671

Sumber : Susenas 2016, BPS

d). Penataan Ruang

Indikator kinerja pembangunan dalam pengendalian penataan ruang antara lain adalah tercukupinya rasio ruang terbuka hijau (RTH) dengan standar minimal 30%. Dari luas kota secara keseluruhan. RTH diupayakan adanya peningkatan tiap tahun nantinya sehingga perkembangan pembangunan Kota dapat diimbangi dengan peningkatan ekologi.

Tabel 2.24
**Aspek Pelayanan Umum dalam
 Bidang Penataan Ruang Kota Kediri**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio ruang terbuka hijau	7,07	7,19	7,1	7,29	8,52
2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	38,46	38,84	39,64	40	41,61
3.	Jumlah Bangunan Ber-IMB	20.473	20.857	21.504	21.776	22.569
4.	Jumlah Bangunan	53.226	53.706	54.245	54.245	54.245

Sumber : LKPJ 2016

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a). Perumahan

Pembangunan di bidang perumahan bertujuan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Indikator kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kota Kediri yaitu rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, lingkungan pemukiman kumuh dan rumah layak huni.

Tabel 2.25
**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan
 Kota Kediri Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	98,92	100	100	85,11	97,89
2.	Rumah tangga pengguna listrik (%)	100	100	100	100	100
3.	Rumah tangga bersanitasi (%)	92,16	92,16	71,01	93,27	96,79
4.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	31,42	37,78	89,20		
5.	Rasio rumah layak huni	85,064	85,420	89,23	89,82	90

Sumber : 1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri,
 2. Kediri Dalam Angka BPS Kota Kediri, 2013

b). Pertanian

Pemerintah Kota Kediri memiliki jumlah tanah sebanyak 1.848 bidang tanah, jumlah tanah yang telah bersertifikat sebanyak 1.254 bidang tanah (50,65%). Berdasarkan data yang ada, jumlah asset

berupa eks Tanah kas desa yang berhasil di inventarisasi oleh Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2008 adalah seluas 10.173.742m². Pada Tahun 2011 yang sudah bersertifikat seluas 9.806.596,40m² atau sebesar 97%. Sedangkan asset bergerak yang dimiliki Pemerintah Kota Kediri sebanyak 354.482 unit senilai Rp.234.235.000.000,00 dan asset tidak bergerak sebanyak 10.181 unit senilai Rp.1.902.571.480.000,00.

Pada tahun 2015 sama dengan tahun 2014, Luas tanah eks TKD yang diinventarisasi seluas 10.173.742m² dari 10.173.742m² luas seluruh tanah eks TKD. Luas tanah eks TKD yang bersertifikat tahun 2013 yaitu seluas 9.846.687,4m² dari 10.173.742m² luas seluruh tanah eks TKD. Sedangkan persentase luas lahan bersertifikat di Kota Kediri dari 63.404Km² luas wilayah, sebanyak 44.382,8Km² atau 70% wilayah telah memiliki sertifikat.

Tabel 2.26
**Aspek Pelayanan Umum
dalam Bidang Pertanahan Kota Kediri**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	70	70	70	70	70
2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	6 dari 10 kasus	2 dari 2 kasus	2 dari 2 kasus	2 dari 2 kasus*	2 dari 2 kasus*
3.	Penyelesaian izin lokasi	3	7	7	7	7

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Kediri

c). Jumlah titik lampu yang terpelihara dan adanya database LPJU

Pencapaian indikator jumlah titik lampu yang terpelihara dan adanya database LPJU dilaksanakan melalui Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum. Pada tahun 2016 jumlah titik PJU yang terpelihara sebanyak 8.567 titik. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan sebanyak 1.475 titik. Penambahan titik PJU yang signifikan pada tahun 2016 sebagian besar dilaksanakan oleh

masyarakat melalui kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) sebanyak 1.446 titik, sedangkan sisanya dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai tindak lanjut hasil Kopi Tahu tahun 2016.

d). Penanganan sampah

Pada tahun 2016 volume sampah yang ditangani sebesar 151.032 m³ dari volume produksi sampah sebesar 172.765 m³ atau mencapai 87,42%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 5,4%.

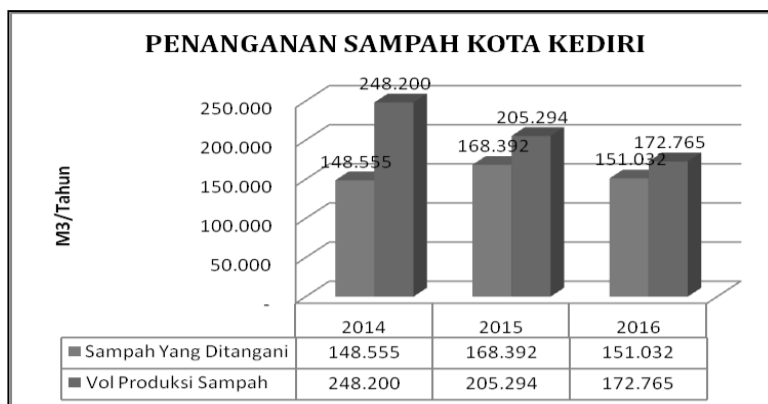
Penanganan sampah di Kota Kediri dilakukan pada beberapa sarana pengelolaan sampah, antara lain pada 36 (tiga puluh enam) TPS, 5 (lima) TPS 3R dan 1 (Satu) TPA. Pada tahun 2016 volume sampah yang ditangani mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2015, yaitu dari 205.293,61 m³ menjadi 172.765,27 m². Hal tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Kediri untuk terus melakukan sosialisasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan persampahan dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta meningkatkan manajemen pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Dalam rangka optimalisasi penanganan sampah, ke depan perlu dilakukan langkah-langkah :

- 1). Sosialisasi pengolahan sampah;
- 2). Peningkatan kapasitas pengolahan sampah;
- 3). Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur pengelola sampah;
- 4). Penambahan sarana prasarana persampahan;
- 5). Fasilitasi, pendampingan dan pelatihan kader bank sampah.

Grafik 2.2

Penanganan Sampah Yang Ditangani Dibanding Volume Produksi Sampah Tahun 2014 – 2016



Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2016

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

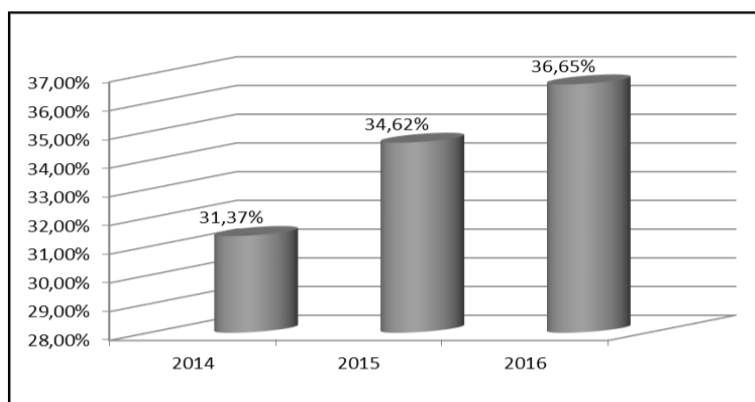
Pada tahun 2015 jumlah organisasi yang dibina sebanyak 99 organisasi dari 286 organisasi (34,62%) sedangkan tahun 2016 jumlah organisasi yang dibina 140 organisasi dari 382 organisasi (36,65%) atau mengalami peningkatan sebesar 2,03 point bila dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik antara ormas dan pemerintah untuk terciptanya situasi yang kondusif. Kedepan monitoring keberadaan Orpol, Ormas dan LSM sangat diperlukan agar data Orpol, Ormas dan LSM setiap tahunnya dapat terupdate guna pemantauan perkembangan kinerja ormas dalam menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang stabil dan kondusif, karena seringkali perubahan atau pergantian kepengurusan Ormas dan LSM serta pindahnya alamat sekretariat yang tidak selalu dilaporkan.

Peningkatan jumlah data organisasi yang terdaftar pada Tahun 2016 ini tidak hanya dikarenakan ada ormas yang baru terbentuk. Banyak organisasi pendidikan yang sudah lama berdiri tapi belum terdaftar di Kantor Kesbangpol pada Tahun itu

banyak yang mengajukan Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Kesbangpol sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan.

Persentase Ormas dan LSM yang terbina Tahun 2014-2016 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 2.3
**Jumlah Ormas dan LSM yang terbina
Tahun 2014 - 2016**



Sumber : Kantor Kesbangpol

b). Satpol PP

Pada tahun 2015 terjadi pelanggaran Perda sebanyak 428 pelanggaran sedangkan tahun 2016 terjadi 267 pelanggaran perda. Bila dibandingkan tahun sebelumnya pelanggaran Perda Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 161 pelanggaran. Upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat pelanggaran tersebut antara lain :

- 1). Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan Perda/Peraturan Walikota/SK Walikota;
- 2). Memberikan pembinaan kepada PK5, Penambang Pasir, dan Pemilik Tempat-tempat Hiburan;
- 3). Memberikan pelatihan-pelatihan kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka peningkatan SDM;
- 4). Meningkatkan kemampuan dan mobilitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui pembenahan sarana dan prasarana;

- 5). Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas atau instansi lain dalam rangka mengamankan dan menegakkan Perda/ Peraturan Walikota/SK Walikota;
- 6). Meningkatkan Operasi Gabungan dengan aparat kepolisian dalam rangka operasi penertiban penambang pasir dan Razia tempat-tempat hiburan.

6. Sosial

Sasaran strategis dalam penyelenggaraan urusan sosial adalah menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Urusan sosial diarahkan untuk meningkatkan mutu serta cakupan layanan sosial kepada masyarakat. Pemerintah kota Kediri juga melakukan pelayanan rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan terhadap PMKS untuk memberikan motivasi dan perubahan sikap mental PMKS dalam meningkatkan taraf hidupnya serta pemberian bantuan sembako.

Tabel 2.27
**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial
 Kota Kediri Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	12 PA 1 PW	12 PA 1 PW	12 PA 1 PW	12 PA 1 PW	12 PA 1 PW
2.	PMKS yang dibantu	292	3.154	3.135	4.077	4.725
3.	Jumlah PMKS	6.205	5.796	4.755	4.725	4.725
4.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social (%)	4,71	54,40	65,93	86,92	100

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri

Tahun 2016 Jumlah PMKS di Kota Kediri tidak berubah dengan jumlah tahun 2015, yakni sebanyak 4.725 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Kediri sebanyak 315.553 jiwa, angka tersebut bersesuaian dengan capaian atau terealisasi sebesar 1,50%.

Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Kota Kediri berhasil ditekan hingga 22.130 orang atau terealisasi sebesar 7,07% dari total jumlah penduduk Kota Kediri yang mencapai 312.999 jiwa. Sedangkan ditahun 2016, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 23.770 orang sesuai pendataan terbaru yang dilakukan oleh BPS.

Pada tahun 2016, Dari 4.725 orang PMKS yang ada di Kota Kediri, 4.725 orang PMKS diantaranya sudah dibina oleh Pemerintah Kota Kediri atau terealisasi sebesar 100%.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

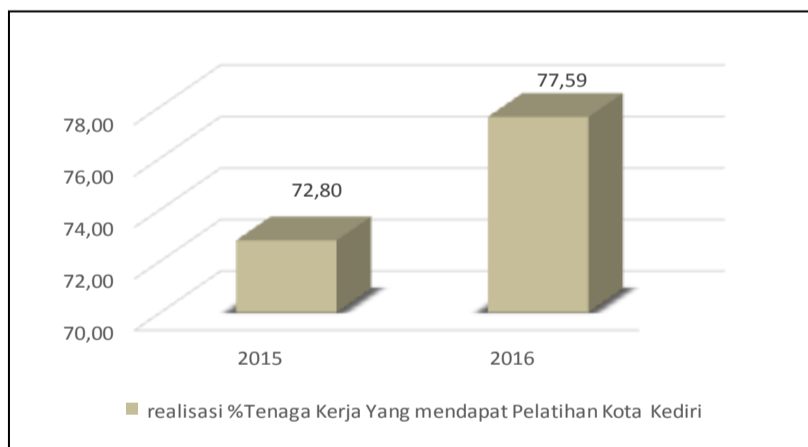
Dari aspek kondisi ketenagakerjaan, kesejahteraan pekerja di Kota Kediri terus mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Kediri dari tahun ke tahun. Kenaikan UMK ini bisa dilihat pada data yang menunjukkan bahwa tren peningkatan UMK terjadi sejak tahun 2012 yaitu masih sebesar Rp.1.037.500,00 pada tahun 2015 sudah menjadi sebesar Rp.1.339.750,00 dan naik lagi menjadi Rp.1.494.000,00 pada tahun 2016.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2016 mencapai sebesar 8,46%. Kenyataannya, pertumbuhan investasi yang cukup tinggi di Kota Kediri di tahun 2016, belum mampu sepenuhnya menyerap angkatan kerja di Kota Kediri. Perbedaan kompetensi angkatan kerja dengan yang dibutuhkan pasar kerja di Kota Kediri menyebabkan lowongan kerja yang ada masih banyak diisi angkatan kerja dari daerah lain. Disamping itu, dampak adanya program pensiun dini yang dilakukan oleh PT. Gudang Garam, TBK secara besar besaran di tahun 2014 yang lalu masih terasa sampai saat ini. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan berbagai paket pelatihan

ketrampilan khususnya dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja. Disamping itu pemberian bantuan peralatan dan pelaksanaan bursa kerja serta paket kebijakan lain perlu dilaksanakan secara lebih masif dan terstruktur.

Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.695 angkatan kerja di Kota Kediri yang mendaftar untuk mendapatkan AK-1 (Kartu Kuning). Dari angka tersebut sebanyak 1.234 pencari kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kota Kediri maupun yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK) yang ada di Kota Kediri atau terealisasi sebesar 72,80%. Sedangkan di tahun 2016, tercatat sebanyak 2.320 pencari kerja di Kota Kediri. dari angka tersebut, sebanyak 1.800 orang diantaranya telah mengikuti pelatihan atau terealisasi sebesar 77,59%. Untuk lebih jelasnya perkembangan realisasi Persentase Tenaga Kerja Yang mendapat Pelatihan Kota Kediri tahun 2015-2016 selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.4
Perkembangan realisasi Persentase Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kota Kediri tahun 2015-2016



Sumber : Dinsosnaker Kota Kediri

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase jumlah Tenaga Kerja Yang mendapat Pelatihan di Kota Kediri tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibanding dengan realisasi tahun sebelumnya, yakni dari 72,80% ditahun 2015 meningkat menjadi 77,59% di tahun 2016.

Selanjutnya pada tahun 2016, dari 33.125 tenaga kerja yang tersebar di berbagai perusahaan yang ada di Kota Kediri, jumlah tenaga kerja yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan 25,609 (77,31%) atau mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2015 dari 33.670 yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan 25.489 (75,70%). Hal ini menunjukkan semakin optimalnya upaya Pemerintah Kota Kediri dalam mensosialisasikan serta pembinaan norma Jamsostek terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Kediri dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Kediri berusaha meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, kualitas dan kapasitas kelembagaan serta jaringan pengarusutamaan gender dan anak.

Tabel 2.28
**Tabel Perlindungan Anak & Perempuan
Kota Kediri Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio KDRT	0,015	0,018	20	0,022	0,0008
	Jumlah KDRT	11	11	18	9	2
	Jumlah RT	71.127	62.192	87.77	117.185	124.150
2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK/ Tk. Partisipasi Angk Kerja)	92,93%	92,93%	93%	65,91%	97,05%
3.	Prosentase Kejadian Kasus KDRT yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Kediri

3. Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan,

dan Ketahanan Pangan. Keberhasilan penyelenggaraan urusan pangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a). Angka Kecukupan Energi (AKE) Kota Kediri tahun 2016 sebesar 2701 kkal/kap/hari, padahal standar nasional AKE adalah 2400 kkal/kap/hari. Prosentase AKE kota Kediri dibanding standar nasional sebesar 113%;
- b). Angka Kecukupan Protein (AKP) tahun 2016 diperoleh hasil yang lebih tinggi yaitu 77,5 gr/kap/hari dibanding standar AKP nasional sebesar 63 gr/kap/hari. Prosentase AKP kota Kediri dibanding standar nasional sebesar 123%. Sehingga prosentase ketersediaan Energi dan Protein Perkapita untuk tahun 2016 adalah 116, 87%;
- c). Jumlah stok cadangan pangan di wilayah untuk kondisi darurat pangan berupa gejolak sosial, bencana maupun kenaikan harga pangan pokok yang melebihi batas kewajaran. Batas minimal cadangan pangan yang harus disediakan sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal adalah sebesar 100 ton ekuivalen beras di tingkat kabupaten/kota. Data yang diperoleh dari BULOG, selaku instansi terkait yang menangani stok pangan, untuk wilayah kota Kediri pada tahun 2016 tersedia stok cadangan pangan kondisi darurat sebesar 100 ton. Sesuai dengan SPM;
- d). Skor PPH Kota Kediri pada tahun 2016 sebesar 87%. Adapun faktor pendorong tercapainya Skor PPH ini adalah adanya : Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif, Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan, Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Peningkatan mutu dan keamanan pangan, Festival dan Promosi Makanan Khas daerah, Kampanye gerakan makan B2SA kepada aparat pemerintah, masyarakat dan individu serta Pengembangan karangkitri.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Ketersediaan pangan di Kota Kediri yang beranekaragam diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Gerakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan dan Gizi, yang bertujuan untuk mengkonsumsi pangan yang beranekaragam serta mengurangi ketergantungan pada satu bahan pangan yaitu beras.

Tabel 2.27
**Capaian Kinerja Sasaran Urusan Ketahanan Pangan
 Tahun 2012-2016**

NO	Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%)	-	-	-	130%	129%
2	Penguatan cadangan pangan (%)	-	-	-	166,67%	163,93%
3	Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah (%)	-	-	-	100,65%	100,37%
4	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	-	-	-	100,22%	100,11%
5	Penangan daerah rawan pangan (%)	-	-	-	111,11%	122,95%
6	Skor pola Pangan Harapan (PPH)	-	-	-	95,56%	100%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

4. Lingkungan Hidup

Dalam urusan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Kediri menitikberatkan pembangunan pada pemanfaatan sumber daya air dan lahan yang dapat memberikan manfaat dengan tetap memperhitungkan daya dukung lahan dengan sasaran program dan kegiatan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi SDA, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air, peningkatan kualitas dan akses informasi SDA, pencegahan dan penanggulangan dampak polusi guna mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan serta penanganan sampah perkotaan Aspek Pelayanan Umum Bidang Lingkungan Hidup Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29
**Aspek Pelayanan Umum Bidang Lingkungan Hidup Kota Kediri
 Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	% Penanganan sampah	84,70	95,91	99,37	82,02	87,42
2.	Pencemaran status mutu air	12,36	12,36	12,36	-	-
	Udara	-	-	-	0	0
	Air Sumur	-	-	-	0	0
	Air Sungai	-	-	-	13	9
	Air Limbah Industri	-	-	-	22	8
3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	18	20	20		
4.	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	11,91%	13,92%	57,57%	89,03%	90,63%
5.	Penegakan hukum lingkungan	100	100	100		

Sumber : KLH dan DKP Kota Kediri

Penanganan sampah di Kota Kediri dilakukan pada beberapa sarana pengelolaan sampah, antara lain pada 36 (tiga puluh enam) TPS, 5 (lima) TPS 3R dan 1 (Satu) TPA. Pada tahun 2016 volume sampah yang ditangani mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2015, yaitu dari 205.293,61 m³ menjadi 172.765,27 m³. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
**Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
 Tahun 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014*	2015	2016
1	Jumlah sampah yang ditangani (m ³)	640,46	659	680	168.392	151.032
2	Jumlah Volume Timbunan Sampah (m ³)	756	778	709	205.293	172.765
3	Persentase Sampah yang ditangani (%)	84,72	84,70	95,91	82,02	87,42

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

Hal tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Kediri selalu mengoptimalkan kinerja pengelolaan sampah.

Antara lain : (1). Dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya 3R yaitu reduksi (*reduce*), pemanfaatan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*) baik di lingkungan rumah tangga, sekolah, maupun perkantoran; (2). Peningkatan kapasitas pemulung dan lapak; (3). Pengomposan yang berbasis masyarakat, dan pemilahan atau bahkan pengolahan sampah sejak dari hulu sehingga diharapkan dapat mengurangi volume buangan sampah ke TPA Klotok di Kelurahan Pojok; (4). Pembentukan bank sampah di masing-masing RT, serta melakukan remediasi (penambangan) sampah pada zona yang aktif.

5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Peningkatan sistem pelayanan publik merupakan salah satu komitmen dari Pemerintah Kota Kediri yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun. Standart pelayanan yang baik, kualitas pelayanan yang memuaskan, kompetensi tinggi dan profesionalisme aparatur pemerintah menjadi salah satu faktor penting pembangunan kota di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu masalah yang perlu dicermati dan diperhatikan untuk mewujudkan sistem *good governance* adalah masalah demografi (kependudukan). Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	-	85	75	87	90,92
	Penduduk Usia > 17 yang ber KTP (jiwa)	-	169.145	192.470	203.310	214,544
	Penduduk wajib memiliki KTP	232.844	198.994	218.671	233.689	235.972
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	98,15	99,33	95,83	94,72	98,00
	Bayi lahir yang ber-akta	3.200	2.081	6.348	3.138	3.290
	Jumlah Kelahiran	3.236	2.095	6.624	3.313	3.357

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
3.	Kepemilikan KK (%)	100	83,26	83,26	82,76	82,19
	Penduduk yg. Memiliki KK	100.587	87.871	92.386	96.987	102.041
	Penduduk wajib memiliki KK	100.587	105.533	110.836	117.185	124.150
4.	Kepemilikan KTP	85	85	88,01	87	90,92
	Penduduk yg. Memiliki KTP	197.918	169.145	192.470	203.310	214,544
	Penduduk Wajib Memiliki KTP	232.844	198.994	218.671	233.689	235.972
7.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Iya	Iya	Iya	Iya	Iya

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri

Kota Kediri sejak tahun 2010 telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi komunikasi by system secara *online*.

6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah Kota Kediri berusaha meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, kualitas dan kapasitas kelembagaan serta jaringan pengarusutamaan gender dan anak.

Tabel 2.32
Tabel Perlindungan Anak & Perempuan
Kota Kediri Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	4,75%	8,30%	9,0%	70,12% 9%	6%
2.	Rasio KDRT	0,015	0,018	20	0,022	0,0008
	Jumlah KDRT	11	11	18	9	2
	Jumlah RT	71.127	62.192	87.77	117.185	124.150
3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK/ Tk. Partisipasi Angk Kerja)	92,93%	92,93%		65,91%	97,05%
4.	Prosentase Kejadian Kasus KDRT yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Kediri

Sedangkan untuk menciptakan keluarga sejahtera maka terlebih dulu melakukan pengendalian pertumbuhan

penduduk melalui Keluarga Berencana dan masyarakat didorong untuk menciptakan keluarga kecil berkualitas.

Tabel 2.33
**Tabel Bidang KB dan Keluarga Sejahtera
 Kota Kediri Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,82	3,80	3,80	3,8	3,8
2.	Cakupan peserta KB aktif	72,89	73,02	72,38	72,90	68,87
	Jumlah peserta KB Aktif	34.318	34.670	30.608	31.146	29.706
	Jumlah PUS	47.080	47482	42.289	42.726	43.134
3.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	27,21	27,04	49,15	26,20	16,32
	Keluarga Pra Sejahtera	6.685	6.642	5.889		5.172
	Keluarga Sejahtera I	12.580	12.714	18.900	20.265	20.265
	Total Keluarga	70.633	71.127	70.965	77.265	74.658

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Kediri

Menurut tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan peserta KB aktif di Kota Kediri mengalami penurunan. Jika pada tahun 2012, cakupan peserta KB aktif mencapai 72,89%, di tahun 2016 turun sebesar 68,87%.

7. Perhubungan

Pembangunan di bidang perhubungan dapat mempengaruhi kelancaran di berbagai bidang dan lintas sektoral.

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Jumlah arus penumpang angkutan umum selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan secara signifikan. Rasio ijin trayek selama dua tahun terakhir juga mengalami peningkatan dari 40 di tahun 2015 menjadi 58,33 pada tahun 2016. Dengan semakin bertambahnya kendaraan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor maka jumlah uji kir angkutan umum periode dua tahun terakhir mengalami peningkatan dari 188

menjadi 191. Tarif biaya pengujian kelayakan angkutan umum selama dua tahun terakhir tidak mengalami kenaikan yakni sebesar Rp.35.000,00 untuk Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) JBB 35000 kg. demikian juga tarif biaya pengujian kelayakan angkutan umum selama dua tahun terakhir untuk jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) JBB 35000kg tidak mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.45.000,00. Dalam kondisi normal, waktu pengerjaan uji kir rata-rata 30 menit per kendaraan. Dalam upaya untuk melengkapi sarana dan prasarana jalan di wilayah Kota Kediri, Dinas Hubkominfo setiap tahun selalu melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Hal ini dilakukan dengan maksud agar supaya keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan dapat terlayani secara optimal. Jumlah pemasangan rambu pada periode dua tahun terakhir mengalami peningkatan yg cukup signifikan.

Secara lengkap data perkembangan perhubungan dapat ditinjau pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.34
**Aspek Pelayanan Umum
dalam Bidang Perhubungan Kota Kediri**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.158.661	903.950	903.950	681.856	726.181
2.	Rasio ijin trayek	67,96	48,54	48,54	40	58,33
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	104	144	144	188	191
4.	Lama Uji KIR (menit)	30	30	30	30	30
5.	Biaya Uji KIR : Mobil penumpang JBB ≤35000 kg	Rp.35Rb	Rp.35Rb	Rp.35Rb	Rp.35Rb	RP. 35Rb
	Mobil penumpang JBB ≥35000 kg	Rp.45Rb	Rp.45Rb	Rp.45Rb	Rp.45Rb	Rp. 45Rb
4.	Jumlah Terminal Bis	1	1	1	1	1
5.	Angkutan darat	161.856	143.733	143.733	159.647	161.409
6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	2	15	15	32	51
7.	Pemasangan Rambu	1.334	1.322	1.322	583	1.065

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Kediri

Di Kota Kediri sendiri saat ini terdapat beberapa ruas jalan yang tingkat pelayanannya kurang memadai meliputi jalan arteri primer, arteri sekunder dan jalan kolektor primer. Kondisi layanan angkutan umum berbasis jalan, dapat digambarkan dengan jumlah arus penumpang masuk dan keluar di terminal tamanan yang tercantum pada tabel diatas, dimana dari tahun ke tahun kondisinya tidak mengalami pertumbuhan bahkan cenderung menurun.

Salah satu upaya peningkatan keselamatan lalu lintas di jalan adalah dengan pemasangan rambu jalan baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah maupun rambu petunjuk. Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan serta pengamanan lalu lintas juga terus ditingkatkan dalam rangka peningkatan keselamatan dan kenyamanan transportasi di Kota Kediri. Transportasi kereta api yang ada di Kota Kediri secara umum digunakan untuk menunjang arus lalu lintas kereta api wilayah timur Pulau Jawa.

8. Komunikasi dan Informasi

Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi seperti surat kabar dan radio.

Urusan Komunikasi berperan dalam memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat terkait berita, permasalahan dan informasi kedaerahan di Kota Kediri.

Tabel 2.35
**Aspek Pelayanan Umum
 dalam Bidang Komunikasi dan Informatika
 Kota Kediri Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah surat kabar nasional/local	6	6	9	32	48

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
2.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	5-4	6-5	5-5	7-13	7-14
3.	Web site milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Optimalisasi penggunaan website sebagai sarana informasi dan komunikasi masyarakat umum sangat diperlukan agar akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai anggaran, perencanaan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RTRK, layanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan dapat dicapai sehingga diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kota Kediri dan meningkatnya kepercayaan publik kepada Pemerintah Kota.

9. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Penyediaan dana penyertaan modal berbunga ringan (6% per tahun) untuk UMKM dan Koperasi yang disalurkan melalui Bank Jatim Kediri dan PD BPR Kota Kediri sampai tahun 2015 sudah memasuki tahun ke-6. Sasaran pembinaan dan fasilitasi tersebut adalah keseluruhan koperasi dan UMKM.

Salah satu usaha pengembangan ekonomi di Kota Kediri adalah koperasi. Manfaat koperasi bisa dirasakan sampai lapisan bawah dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2015 sebanyak 409 buah meningkat menjadi 456 buah pada tahun 2016. Peningkatan ini dipengaruhi adanya program penumbuhan koperasi "1 Koperasi 1 RW", pemberian buku-buku perkoperasian, adanya sosialisasi serta adanya pendampingan.

Tabel 2.36
**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi,
 Usaha Kecil dan Menengah Kota Kediri
 Tahun 2011-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase koperasi aktif berkualitas	21,62	24,31	57,14	77,99	113.69
	Jumlah koperasi aktif berkualitas	77	89	89	319	251
	Jumlah koperasi aktif	356	366	378	409	456
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM tangguh	11.427	12.342	13.576	-	-
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	15.837	16.517	16.788	-	-
3.	Jumlah BPR/LKM Mandiri	10.343	11.417	12.641	-	-
	Jumlah BPR/LKM	11.387	11.472	12.641	-	-
4.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	-	29.306	29.306	31.383	-

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) keberadaannya dirasa semakin penting, sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap dan menciptakan lapangan kerja dan mendayagunakan sumber daya lokal dalam proses produksi.

10. Penanaman Modal

Penanaman modal di Kota Kediri masih fluktuatif, sejumlah usaha dilakukan untuk mendongkrak penanaman modal diantaranya melalui promosi potensi daerah, perbaikan regulasi perijinan termasuk penyederhanaan proses Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), kesiapan infrastruktur sampai dengan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha.

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/ efek pengganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan

perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor. Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal atau investasi. Penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari sektor industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Penanaman modal di Kota Kediri periode dua tahun terakhir tidak ada peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan adanya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebanyak 53 investor dengan jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) sebesar Rp.689.292.500.000.

Tabel 2.37
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Kota Kediri

Uraian		Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)
Tahun	2012	2	430.076.051.747	(802.061.029.321)
	2013	24	199.632.000.000	(230.444..051.747)
	2014	53	2.128.699.000.000	174.804.000.000
	2015	53	689.292.500.000	(1.439.406.500.000)
	2016	53	689.292.500.000	-

Sumber : Badan Penanaman Modal Kota Kediri

11. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda sebagai generasi penerus harus mampu menunjukkan eksistensinya melalui berbagai prestasi di semua bidang dan ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk olahraga perlu digali atlet dan cabang olahraga daerah yang menonjol dan berprestasi untuk dibina dan dikembangkan sehingga dapat mengangkat nama daerah.

Untuk meningkatkan prestasi olahraga dilakukan melalui bekerjasama dengan KONI Kota Kediri dan Organisasi persatuan olahraga yang ada di daerah. Dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan diharapkan akan muncul atlet daerah yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Pembangunan pemuda dan olah raga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk meningkatkan prestasi pemuda di daerah perlu dilakukan pembinaan dan ajang prestasi pemuda melalui even seleksi pemuda berprestasi yaitu pemuda pelopor.

Tabel 2.38
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga Kota Kediri

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah organisasi kepemudaan	38	39	39	39	39
2.	Jumlah peran serta pemuda dalam pembangunan (orang)	-	-	-	76.000	77.360
3.	Prestasi Olahraga yang dibina Disbudparpora	-	-	-	-	14
4.	Prestasi Olahraga yang dibina KONI	-	-	-	-	37
5.	Gelanggang/balai remaja	48	48	48	48	48
6.	Lapangan olahraga	20	20	20	20	20

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga Kota Kediri

12. Kebudayaan

Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya diperlukan sebagai upaya melestarikan nilai-nilai tradisi dan budaya adat masyarakat serta pengembangan kesenian daerah sekaligus menjadi daya tarik wisata daerah.

Urusan kebudayaan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga dan melestarikan budaya daerah melalui pemeliharaan situs-situs sejarah dan penyelenggaraan even budaya. Untuk menjaga kekayaan seni dan budaya daerah maka harus ada upaya untuk memelihara keberadaannya melalui pelaksanaan even budaya dan pemeliharaan cagar budaya.

Salah satu upaya untuk melestarikan kebudayaan yaitu meningkatkan pentas seni dan budaya antara lain melalui event hari jadi Kota Kediri, penyelenggaraan festival seni yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tiap tahun makin meningkat, pemeliharaan benda, situs, dan

kawasan cagar budaya. Festival seni dan budaya yang diselenggarakan di Kota Kediri pada tahun 2016 adalah sejumlah 69 kegiatan, meningkat 19 kegiatan jika dibandingkan tahun 2015. Sedangkan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang harus dilestarikan pada tahun 2016 sebanyak 292 buah, atau meningkat 17 koleksi museum dari tahun 2015 sebanyak 275 buah.

Tabel 2.39
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Kota Kediri

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	38	51	48	50	69
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12	12	12	12	12
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	18	19	21	275	292
3.	Kekayaan budaya dan berkembangnya pariwisata budaya yang terpelihara	-	-	-	146	202

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga

13. Statistik

Data statistik dan informasi yang terdokumentasi sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, selama periode 2012-2016 sebagai berikut :

Tabel 2.40
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kota Kediri

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Buku "Daerah Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku "PDRB Daerah"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kota Kediri

14. Perpustakaan

Kinerja pembangunan pada pelayanan umum yang berkaitan urusan perpustakaan selama periode 2012-2016 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.41
Aspek Pelayanan Umum
dalam Bidang Perpustakaan Kota Kediri

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah perpustakaan	53	54	54	54	177
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan umum per tahun (orang)	15.030	17.800	13.588	22.514	24.151
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buah)	29.219	32.225	32.225*		

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pada tahun 2016 total jumlah perpustakaan di Kota Kediri sebanyak 177 perpustakaan, meliputi : perpustakaan umum, perpustakaan di kelurahan dan perpustakaan di sekolah. Dari total 177 perpustakaan tersebut, seluruhnya atau sebanyak 177 perpustakaan telah memiliki tenaga pengelola yang mempunyai kemampuan teknis pengelolaan perpustakaan.

15. Kearsipan

Guna meningkatkan pengelolaan urusan kearsipan dan menyelamatkan serta menatausahakan dokumen-dokumen daerah yang masih aktif, diperlukan sistem kearsipan dan sarana penyimpanan arsip dokumen yang handal, meliputi dokumen yang ada di SKPD-SKPD maupun yang ada di gudang arsip Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2016 dari total 85 SKPD di Kota Kediri, seluruh SKPD telah menerapkan penyelamatan dan pelestarian arsip sesuai ketentuan. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah SKPD yang menerapkan penyelamatan dan pelestarian arsip sesuai ketentuan sebanyak 67 SKPD, maka kinerja penyelamatan dan pelestarian arsip meningkat 26,87%. Adapun keseluruhan SKPD telah melaksanakan penyimpanan dan pengelolaan arsip secara baku.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian perlu dilaksanakan untuk lebih meningkatkan partisipasi atau swadaya petani dan masyarakat agar petani dan masyarakat mampu untuk mengembangkan dan menjalankan usahanya secara professional, efisien serta berdaya guna dengan lebih memanfaatkan ilmu dan teknologi secara tepat dan ramah lingkungan. Dengan begitu bisa dihasilkan produk yang mempunyai daya saing tinggi. Dengan dihasilkannya produk yang berdaya saing tinggi tentunya akan dapat meningkatkan penghasilan petani, sehingga tingkat kesejahteraan petani akan meningkat.

Secara umum hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.42
Perkembangan Hasil Pertanian Tanaman Pangan

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi					
	Luas areal Panen (Ha)	1.625	2.362	1,776	1.975	2.048
	Jumlah Produksi Gabah Kering giling (Ton)	10.451,45	13.467,60	9.860	10.703	11.184
	Produksi beras (Ton)	7.316,00	7.985,00	6.186	6.715	7.017
2	Jagung					
	Luas areal produksi (Ha)	899	937	917	1.066	793
	Jml. produksi (Ton)	6.803,50	6.407,77	6.382	740	5.327
3	Kedelai					
	Luas areal panen (Ha)	16	23	23	28	7
	Jumlah produksi (Ton)	24	36,8	34,5	40,6	11,2

Sumber : Dinas Pertanian Kota Kediri

Tabel 2.43
Perkembangan Hasil Perkebunan

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Produksi Tebu					
	Luas Areal (Ha)	1.657,87	1.620,77	1.408,06	1.460	1.460
	Jumlah Produksi (Kw)	1.401.701	1.356.641	1.275.100	913,770	1.400
	Produksi Tebu 2 PG (Pesantren dan Mrican) :					
	Luas Areal (Ha)	15.850,85	15.401,47	14.852,65	1.460	1.460
	Jumlah Produksi (Kw)	13.061.503	13.645.662	14.689.354	913.770	1.400

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
2	Jambu Mente					
	Luas Areal (Ha)	11,03	4,18	4,52	6	0.15
	Jumlah Produksi (Kw)	5,08	1,94	2,00	0,25	-
3	Kelapa					
	Luas Areal (Ha)	150,84	34,82	25,18	25	19
	Jumlah Produksi (Ton)	6,07	2,49	1,57	1,28	-

Sumber : Dinas Pertanian Kota Kediri

Tabel 2.44
**Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura
serta perkebunan**

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Meningkatnya produksi Tanaman Padi (ton)	64,32	-	-	12.936	13.225
2.	Meningkatnya produksi Tanaman Jagung (ton)	67,5	-	5.713	5.577	5.618
3.	Peningkatan produksi tanaman tebu (Kw)	13.645.662	-	1.278.035	1.343.728	1.357.728
4.	Kelompok tani yang dibantu pemasarannya (Klp)	-	-	-	13	7
5.	Kelompok tani yang mengikuti Pelatihan Ketrampilan (%)	-	-	-	100	59
6.	Demplot yang dibuat oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (buah)	-	-	-	4	4

Sumber : Dinas Pertanian Kota Kediri

2. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kolam-kolam baru dan penerapan teknologi budidaya dengan sistim Probiotik dapat mendorong keberhasilan dalam peningkatan produksi ikan dengan ditunjang dengan direhabnya UPTD Pembenuhan dan Kolam Ikan, sehingga diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat atas benih ikan yang bermutu. Produksi Ikan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.45
Meningkatnya Produksi Perikanan

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Meningkatnya produksi ikan (Kw)	1.988,70	1.390,30	1.498,10	1.506,5	1.859,50

Sumber : Dinas Pertanian Kota Kediri

3. Kehutanan

Urusan Kehutanan dilaksanakan selain untuk menjaga kelestarian hutan juga untuk mendorong peningkatan produksi hutan khususnya hutan rakyat. Konservasi hutan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi-fungsi dasarnya seperti perlindungan sumber daya alam, tanah dan tata guna air.

Realisasi pelaksanaan reboisasi areal hutan sampai dengan tahun 2016 seluas 115,00 Ha. Sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 115 Ha atau tercapai 100%, hal ini didukung oleh berbagai kegiatan yang dijalankan sejak tahun 2008 yaitu kegiatan *One Man One Tree* dan *One Billion Indonesian Tree* yang rutin dijalankan setiap tahunnya.

Konservasi hutan dengan tetap menjaga fungsi-fungsi dasarnya seperti perlindungan sumber daya alam, tanah dan tata guna air sangat perlu dilakukan dengan melaksanakan reboisasi hutan. Luasan hutan yang direboisasi dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.46
Terwujudnya perlindungan hutan dan sumber daya alam

NO.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Meningkatnya areal tanaman hutan yang direboisasi (ha)	-	-	-	115	115

Sumber : Dinas Pertanian Kota Kediri

4. Pariwisata

Urusan pariwisata dilaksanakan untuk meningkatkan industri pariwisata agar mampu memberikan *multiplier effect* terhadap perkembangan ekonomi daerah. Peningkatan pembangunan kepariwisataan nampak dari semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan potensi dan obyek-obyek pariwisata daerah untuk meningkatkan daya tarik dan kunjungan wisata ke Kota Kediri.

Pariwisata di Kota Kediri meliputi wisata alam, wisata budaya (wisata religi, cagar budaya) dan wisata minat khusus. Beberapa obyek wisata yang ada di Kota Kediri adalah :

- a). Wisata Alam : Kawasan Wisata Selomangleng, Dermaga Joyoboyo, Sumber Alam Sumber Bulus, Sumber Cakarsi, Mata Air (sumber) Lo, Gunung Klotok, Sumber Gayam dan Jalan Tembus Lebak Tumpang;
- b). Wisata Budaya : Museum Airlangga (Cagar Budaya dilindungi), Makam Kuno Mbah Boncolono, Komplek Makam Islam Kuno Mbah Wasil, Makam Sunan Geseng, Masjid Aulia Setonogedong, Gereja Merah, Gereja Vicencius, Pura Sekartaji, Klenteng Tri Dharma, Masjid Agung Kota Kediri, Goa Padedean, Goa Selobale;
- c). Wisata minat khusus : Taman Wisata Selomangleng, Taman Wisata Pagora, Taman Wisata Tirtoyoso, Pabrik Rokok Gudang Garam, Taman Sekartaji, Taman Alun-alun Kota dan Soto Bok Ijo.

Jumlah kunjungan wisatawan dapat menjadi ukuran untuk meningkatkan pariwisata daerah maka dari itu perlu dikembangkan obyek-obyek pariwisata daerah untuk menarik kunjungan wisatawan, kunjungan wisatawan merupakan pelecut bagi Pemerintah Kota untuk lebih meningkatkan lagi potensi wisata yang ada untuk dikembangkan lagi agar lebih menarik wisatawan.

Potensi Obyek wisata yang dikembangkan pada Tahun 2016 bertambah sebanyak 2 obyek wisata yaitu Sumber Mata Air Cakarwesi yang terletak di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan Sumber Mata Air Jiput yang terletak di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kunjungan wisata	135.758	91.571	91.545	264.647	273.564
2	Meningkatnya potensi obyek wisata (%)	-	-	-	100%	100%
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata (%)	-	-	-	100%	100%

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dengan adanya kelompok sadar wisata seperti PHRI berperan aktif mempromosikan wisata kota kediri kepada wisatawan yang bermalam di hotel dan sedangkan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang sudah terbentuk selama ini berperan sebagai pendukung pariwisata di kawasan wisata di kota kediri.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan energi dan pemanfaatan sumber daya mineral serta pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air bawah tanah.

Kinerja pelaksanaan urusan energi dan sumber daya mineral diukur dari indikator penurunan Konsumsi Energi (Premium). Yang dihitung dari jumlah konsumsi energi (premium) dibandingkan dengan jumlah energi (BBM). Yang termasuk kategori BBM meliputi premium, biosolar, pertamax, pertalite dan dex pertamina.

Pencapaian Prosentase penurunan konsumsi Energi yang tersedia terutama premium disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk beralih ke pertalite dan pertamax serta Adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi kuota premium dan menambah kuota pertalite dan pertamax. Dalam proses pengendalian dan pemanfaatan sumber daya terutama air bawah tanah mengalami hambatan diantaranya Kewenangan perijinan air tanah di Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur sehingga

mebutuhkan koordinasi yang lebih intensif, Belum adanya penindakan tegas bagi pengguna air tanah yang tidak memenuhi kewajibannya, Masih adanya kendala dalam pemasangan meter air, Informasi ijin terbit terlambat diterima.

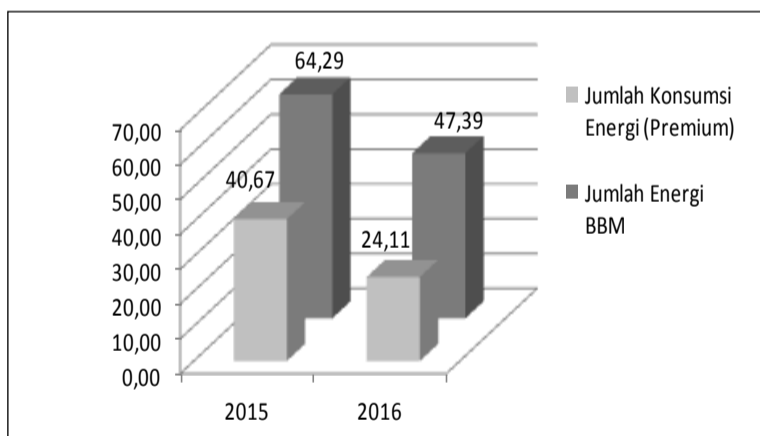
Tabel 2.48
Capaian Kinerja Sasaran Urusan ESDM Tahun 2012-2016

No	Indikator Sasaran	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Prosentase Penurunan Konsumsi Energi (Premium) yang tersedia	-	-	-	-	58,25%
2.	Prosentase pengambilan air tanah yang berijin	-	-	-	-	96,46%

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Data konsumsi energi di Kota Kediri menunjukkan konsumsi premium tahun 2016 sebesar 24,11 juta kilo liter dan konsumsi BBM tahun 2016 sebesar 47,39 juta kilo liter atau terealisasi 50,88%. Sedangkan jumlah konsumsi energi (premium) pada tahun 2015 mencapai 40,67 juta kilo liter. Grafik perkembangan konsumsi energi dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Grafik 2.5
Prosentase Pengguna Energi dan SDM



Sumber : Dinas Perindagtamben Kota Kediri

Pada tahun 2016 jumlah pengambilan air tanah yang berijin sebanyak 45.256,14 meter kubik dibandingkan jumlah total pengambilan air tanah sebanyak 46.916,5 meter kubik atau terealisasi 96,46%. Hambatan yang dihadapi dalam pemantauan pemanfaatan air tanah adalah

Kewenangan perijinan air tanah di Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih intensif.

6. Perdagangan

Urusan perdagangan dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan dibidang perdagangan yaitu meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan barang dan jasa.

Sebagian besar penduduk Kota Kediri bekerja pada sektor usaha perdagangan besar dan perdagangan eceran. Kota Kediri yang dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Jawa Timur, memiliki aktivitas perdagangan dengan ketersediaan fasilitas usaha perdagangan seperti beragam pasar tradisional maupun pasar modern, mulai dari Pasar Setonobetek, Pasar Induk Buah dan Sayur Ngronggo, pusat perdagangan Jl. Dhoho, Pasar Raya Sri Ratu, Ramayana, dan Hypermart-Matahari serta sejumlah sentra ekonomi komoditas unggulan lokal daerah.

Selain perdagangan lokal dan regional, Kota Kediri juga memiliki pangsa pasar perdagangan luar negeri (ekspor). Pada tahun 2016 ekspor perdagangan tercatat sebesar US\$ 203.181.848,94 meningkat US \$119,79 dibanding jumlah ekspor tahun 2015 sebesar US \$187.105.457. Tercatat dua perusahaan yang melaksanakan ekspor yaitu PT. Gudang Garam Tbk dan PT. Kediri Wood Industry. Meningkatnya ekspor ini didorong oleh peningkatan penjualan PT. Gudang Garam Tbk yang tumbuh sekitar 19,58 % per semester I ditahun 2016 dengan negara tujuan ekspor paling besar adalah Malaysia dan negara di kawasan Timur Tengah, hal ini dikarenakan banyaknya tenaga kerja Indonesia yang menetap serta banyaknya warga Indonesia yang menjalankan ibadah haji maupun umroh ke tanah suci.

Untuk mendorong nilai ekspor dilakukan diversifikasi produk yang diekspor serta diversifikasi pasar ekspor

dengan melakukan promosi produk-produk unggulan Kota Kediri dalam pameran-pameran baik berskala lokal maupun nasional. Pameran berskala lokal seperti Gebyar Produk Unggulan Daerah diselenggarakan di Kediri Town Square, di Stadion Brawijaya dan Kediri Food Festival yang merupakan rangkaian dari acara *Explore The Heritage Of Kediri*.

Pameran berskala nasional yang diikuti selama tahun 2016 diantaranya yaitu di GOR Bung Karno Nganjuk, Diandra Convention Center Surabaya, Grand City Surabaya, Hotel Grand Bali Beach Sanur Bali, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, GOR Untung Suropati Pasuruan, GOR Ranggajaya Anuraga Tuban, Mega Mall Batam Center Batam serta di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta.

Jenis produk-produk unggulan Kota Kediri yang sering diikutsertakan dalam pameran yaitu : Produk makanan seperti keripik tempe, stick tahu, tahu takwa dan getuk pisang, Produk kain seperti tenun ikat Bandar, batik khas Kota Kediri atau batik jumputan serta Produk kayu atau tembaga seperti furnitur, kalung, gelang, batok kelapa dan manik-manik.

7. Perindustrian

Sasaran strategis urusan perindustrian adalah meningkatnya pertumbuhan usaha perindustrian terutama industri kreatif.

Pada tahun 2016 jumlah industri tercatat 3.105 unit mengalami 2,10% dibanding capaian jumlah industri tahun 2015 sejumlah 3.041 unit. Faktor pendorong pertumbuhan industri yaitu : a). Tumbuhnya usaha industri yang tercipta melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas), Jakarta Fashion Week (JFW) kerjasama dengan desainer Hannie Hananto serta Lenny agustine, Dhoho Street Fashion 2nd; b). Tumbuhnya Wira Usaha Baru (WUB) sebagai tindak lanjut dari pelatihan; c). Mendorong peningkatan kualitas produk dan desain dengan

terlaksananya pelatihan seperti workshop desain motif tenun dengan proses pengerjaan yang berbeda menggunakan benang emas dan workshop packaging yang memberikan pengetahuan tentang pengemasan produk sesuai dengan standar SNI; d). Inovasi produk baru dengan mengadakan seminar dan festival tahu yang bekerja sama dengan Omar Niode Foundation serta menghadirkan chef dari Australia dan Italia; e). Study banding Aspemmtari IKM mamin di Kota Batu dan Kota Malang yang bertujuan memberikan wawasan kepada IKM tentang proses produksi dan pengemasan produk makanan seperti pia, minuman buah, keripik tempe dan keripik buah; serta f). pelaku industri yang sudah mengurus izin P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan serta Hak Merk dari Kemenkum HAM ataupun Sertifikat Halal dari MUI.

Selain itu untuk lebih menguatkan julukan Kediri sebagai Kota Tahu, Pemerintah Kota Kediri menciptakan inovasi-inovasi produk unggulan seperti produk Tahu Kaleng Kota Kediri (TAKAKORI) sebagai icon baru produk olahan tahu dalam kemasan kaleng sehingga mempunyai daya tahan yang lebih lama. Dengan adanya TAKAKORI yang mempunyai varian rasa seperti oseng-oseng tahu lombok abang, oseng-oseng tahu lombok ijo dan oseng-oseng tahu mercon diharapkan masyarakat yang berada di luar daerah maupun di luar negeri tetap bisa menikmati produk olahan tahu Kota Kediri.

Sampai dengan tahun 2016 jumlah industri besar sebanyak 3 unit usaha dan industri menengah sebanyak 81 unit usaha, sehingga total 84 unit usaha. Sedangkan jumlah IKM yang terdata baik IKM formal maupun IKM non formal sebanyak 2.369 unit, mengalami peningkatan sebanyak 64 IKM dibanding capaian tahun 2015 sebanyak 2.305 IKM. Sentra industri potensial yang dikembangkan tercapai sebanyak 32 sentra dari 44 sentra industri yang ada (72,73%).

8. Transmigrasi

Pada tahun 2015 di Kota Kediri tercatat sebanyak 5 KK yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program transmigrasi, dari jumlah tersebut, 3 KK diantaranya telah diberangkatkan menjadi transmigran di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan di tahun 2016, dari 5 KK yang mendaftar menjadi transmigran, sebanyak 4 KK yang telah diberangkatkan menjadi transmigran.

2.3.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang

1. Perencanaan Pembangunan

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top-down, dan bottom up dengan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah terdiri atas :

- a). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013;
- b). RPJMD Kota Kediri 2014-2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014;
- c). Renstra SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan yang disahkan dengan Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/421/419.16/2014;

- d). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional;
- e). Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Sesuai yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 bahwa RKPD selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Persentase kesesuaian program RKPD dibanding dengan program RPJMD menggambarkan konsistensi antara penyusunan perencanaan tahunan dan dokumen perencanaan jangka menengah pada tahun 2016 tercapai 98,55%, yaitu program-program pembangunan yang dilaksanakan di RKPD 2016 yang sesuai dengan RPJMD sebanyak 204 dari total program yang ada pada RKPD sebanyak 207 program. Sedangkan penetapan dokumen RKPD Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2016 tidak melebihi batas waktu penetapan (31 Mei 2016).

2. Otonomi Daerah

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah Ada beberapa indikator bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan antara lain, penegakan perda, penyelenggaraan administrasi kependudukan, fasilitasi dan penyelesaian kasus hukum dan HAM, pengelolaan keuangan, pengawasan, pembinaan pegawai hingga penerapan reformasi birokrasi merupakan indikator Pemerintah Daerah. Secara lengkap pembahasan di bawah ini :

a). Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Penyelenggaraan Kamtrantibum

Dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri. Rasio Jumlah Polisi PP/10.000 Penduduk dan Penegakan Perda.

Tabel 2.49
Rasio Jumlah Polisi PP/10.000 Penduduk

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	jumlah Polisi Pamong Praja	87	73	68	108	165
2.	Jumlah Penduduk	312.331	267.310	293.282	312.999	315.553
3.	Rasio Satpol per 10.000 penduduk	2,79	2,73	2,32	3,45	5,23
4.	Jumlah Pelanggar Perda	89	52	48	428	267
5.	Menurunnya tingkat pelanggaran Perda	94,68	55,31	51,06	47,92	37,62

Sumber : Kantor Satpol PP Kota Kediri

*) data tidak tersedia

b). Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan untuk menjaga kamtramtibum maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling. Rasio Linmas per 10.000 penduduk dan rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan ditunjukkan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 2.50
Rasio Jumlah Linmas / 10.000 Penduduk

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Linmas	1.200	1.506	1.506	1.401	1.420
2.	Jumlah Penduduk	312.331	267.310	293.282	312.999	315.553
3.	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	38	56	56	44,76	45

Sumber : Kantor Satpol PP Kota Kediri

c). Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Melalui Bagian Humas dan Protokol, Pemerintah Kota Kediri telah melakukan penyebarluasan informasi pemerintah daerah baik melalui media massa maupun media internal seperti *website* www.kedirikota.go.id, Radio Barometer, Tabloid Kota Kita, Majalah Barometer dan juga media sosial. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurang cepat dan *updatenya* SKPD dalam memberikan informasi ke Bagian Humas, akibatnya penyebarluasan informasi ke media massa mengalami keterlambatan. Sebagai solusinya, ke depan selain menerima berbagai informasi dari SKPD, Bagian Humas dan Protokol akan melakukan jemput bola ke SKPD untuk memperoleh berita dan informasi yang akurat. Diharapkan SKPD dapat menginventarisasi dan memetakan kegiatan-kegiatan yang dipublikasikan melalui bagian Humas, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih terintegrasi, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2016 jumlah SKPD dan atau lembaga yang terkoneksi dengan jaringan data di PDE adalah sebanyak 104 SKPD dari 104 SKPD yang ada atau 100% sesuai dengan target kinerja yang direncanakan yaitu dengan adanya dukungan tenaga teknis serta perencanaan yang tepat sehingga seluruh SKPD di Pemerintah Kota Kediri dapat terkoneksi dengan jaringan data di PDE guna mendukung kinerja perencanaan, keuangan, kependudukan, kepegawaian dan lain sebagainya.

d). Hukum dan HAM

Terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah digunakan 3 (tiga) indikator kinerja yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.51
Penetapan dan Sosialisasi Perda dan Penyelesaian kasus hukum

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penyusunan produk hukum daerah	11 Perda 58 Perwal 365 SK	15 Perda 52 Perwal 419 SK	14 Perda	13 Perda	8 perda
2.	Jumlah Kajian Produk Hukum Daerah	-	-	25 Kajian	22 Kajian	22 kajian
3.	Jumlah kasus hukum yang ditindaklanjuti	2 kasus	5 kasus	3 kasus	10 Kasus	8 kasus

Sumber : Bagian Hukum Kota Kediri

e). Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah nampak dari penilaian terhadap transparansi pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pemerintah Kota Kediri telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPD Kota Kediri, selama tiga tahun berturut-turut yaitu yaitu LKPD 2014, 2015 dan 2016 yang diterima pada tahun 2017 lebih cepat dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Diperolehnya opini WTP tersebut, selain sebagai prestasi yang membanggakan juga merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Kota Kediri untuk dapat mempertahankannya kinerja yang telah dicapai selama ini. Keberhasilan tersebut selain tepat waktu dalam penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah juga didukung oleh meningkatnya kesadaran

dan kepatuhan SKPD di lingkup Pemerintah Kota Kediri dalam penyelesaian laporan keuangan serta inventarisasi aset daerah.

f). Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi mencakup 6 (enam) area perubahan di Kota Kediri yaitu :

- 1). Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan pada 37 SKPD Kota Kediri dan fasilitasi penataan kelembagaan SKPD Kelurahan;
- 2). Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO 9001:2008, serta pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 3). Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui diklat aparatur;
- 4). Penguatan Pengawasan, dilaksanakan melalui pengawasan internal pada 60 obyek pemeriksaan lingkup kota dan 35 obyek pemeriksaan lingkup kabupaten/kota, serta implementasi Sistem Pengendalian Pengawasan Intern Pemerintah pada 2 SKPD Kota Kediri;
- 5). Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Walikota Kediri Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kinerja meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan meningkatkan hasil penilaian EKPPD, SAKIP, IKM.

Nilai EKPPD, Skor Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Kediri yang dilakukan Tahun 2016 adalah **3,0615 (Sangat Tinggi)**. Pemerintah Kota Kediri menduduki peringkat 16 dari 38 Pemerintah Daerah di Jawa Timur. Prestasi kinerja ini meningkat 0,0925 point dan naik 4 peringkat bila dibanding capaian tahun 2015 yang mana Pemerintah Kota Kediri memperoleh skor **2,9690 (Tinggi)**, dan menduduki peringkat 20 dari 38 pemerintah Daerah di Jawa Timur.

Hasil Evaluasi SAKIP terhadap Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2016 sebesar 50,41 atau dengan predikat penilaian CC (Cukup Memadai). Meningkat 1,69 point bila dibandingkan dengan capaian nilai SAKIP tahun 2015 sebesar 48,72 atau predikat C (kurang). Selanjutnya hasil survey IKM tahun 2016, menunjukkan bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Kediri adalah B, sesuai dengan yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2014-2019.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM aparatur maka dilakukan : Diklat Formal, Diklat Kader, tes kompetensi, Kenaikan Pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data. Adapun rincian Diklat Aparatur Kota Kediri sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.52
Diklat Aparatur Kota Kediri 2012-2016

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Diklat Struktural	52	128	8	536	610
2.	Diklat Fungsional	2	1	-	-	80
3.	Diklat Teknis	239	718	724	15	23
4.	Diklat Prajabatan	560	205	-	6.288	6.358

Sumber : BKD Kota Kediri

4. Pengawasan

Pengawasan yang difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan (obrik) di seluruh SKPD perlu dilakukan agar kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan regulasi, kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2016 jumlah SKPD yang melaksanakan SPIP sebanyak 10 adapun kesepuluh SKPD yang dimaksud antara lain :

- 1). Dinas Pendidikan;
- 2). Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
- 3). Bagian Organisasi;
- 4). Badan Pengelola Keuangan dan Asset;
- 5). Dinas Pekerjaan Umum;
- 6). Inspektorat;
- 7). Bappeda;
- 8). Kecamatan Pesantren;
- 9). Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
- 10). Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Salah satu aspek yang harus dikembangkan Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan kemampuan kemandirian daerah adalah Peningkatan daya saing daerah. Peningkatan kemandirian dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal merupakan usaha optimalisasi sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi kemasyarakatan untuk mengembangkan ekonomi daerah dan/atau kota. Letak geografis Kota Kediri sangat

strategis karena berada di tengah Kabupaten/Kota lainnya. Kondisi ini memungkinkan Kota Kediri untuk melakukan peningkatan dan pengembangan sektor perdagangan dan jasa guna menyerap pangsa pasar Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Melalui peningkatan daya saing daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Kota Kediri yang diorientasikan sebagai pusat penyedia layanan jasa dan perdagangan, sekaligus meningkatkan produktivitas daya beli dan kemampuan berwirausaha masyarakat.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tingkat kesejahteraan (bidang ekonomi) suatu rumah tangga atau penduduk dapat dilihat melalui besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga atau penduduk yang bersangkutan. Namun data yang akurat tentang besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh penduduk sangat sulit diperoleh. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsumsi/pengeluaran yang diperoleh dari SUSENAS. Semakin tinggi pengeluaran penduduk baik untuk konsumsi makanan maupun non makanan berarti pendapatan penduduk tersebut juga semakin tinggi, yang mana dapat mencerminkan semakin baiknya tingkat kesejahteraan penduduk yang bersangkutan.

Selama tahun 2016, pengeluaran penduduk per kapita per bulan di Kota Kediri terpusat pada kelompok pengeluaran lebih dari Rp.1.000.000,00 per bulan, dengan ditunjukkan angka sebesar 39%. Kelompok pengeluaran penduduk di Kota Kediri per kapita per bulan terbesar berikutnya yaitu Rp.300.000,00-Rp.499.999,00 atau sekitar 24%, pada kelompok pengeluaran Rp.500.000,00-Rp.749.999,00 sekitar 22%, pada kelompok pengeluaran Rp.750.000,00-Rp.999.999,00 sebesar 15%, dan sisanya sekitar 2% pada kelompok pengeluaran Rp.200.000,00-Rp.299.999,00. Sehingga bisa diartikan bahwa setiap 100 (seratus) penduduk di Kota Kediri 39 penduduk diantaranya memiliki pengeluaran per kapita per bulan diatas Rp.1.000.000,00; 24 penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan Rp.300.000,00-

Rp.499.999,00; 22 penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan Rp.500.000,00-Rp.749.999,00; 15 penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan Rp.750.000,00-Rp.999.999,00 dan hanya 2 penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan Rp.200.000,00-Rp.299.999,00. Tidak ada lagi penduduk di Kota Kediri dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Rp.200.000,00.

Tabel 2.53

**Persentase Pengeluaran Penduduk per Kapita per Bulan
Se Karesidenan Kediri Menurut Kelompok Pengeluaran (SUSENAS)
Tahun 2016**

Kabupaten/ Kota	Kelompok Pengeluaran (Rupiah)						1 jt Ke Atas
	< 100.000	100.000 - 199.999	200.000 - 299.999	300.000 - 499.999	500.000 - 749.999	750.000 - 999.999	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Trenggalek	0,00	1.71	16.61	33.25	19.40	10.55	18.48
Tulungagung	0.00	0.32	8.75	28.87	24.60	12.24	25.21
Kab. Blitar	0.00	1.17	9.43	30.90	24.06	13.85	20.59
Kab. Kediri	0.00	0.98	11.04	37.31	20.11	11.84	18.73
Nganjuk	0.00	1.21	14.52	35.97	20.41	12.51	15.37
Kota Kediri	0.00	0.00	2.46	24.11	22.38	15.01	36.05
Kota Blitar	0.00	0.00	4.02	24.46	15.27	17.08	39.16
JAWA TIMUR	0.00	0.78	8.60	29.16	21.53	13.78	26.17

Sumber : BPS Kota Kediri

Distribusi secara keseluruhan pengeluaran penduduk per kapita per bulan se Karesidenan Kediri dan Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa dari 7 Kabupaten/Kota se Karesidenan Kediri ada 2 kota yaitu Kota Kediri dan Kota Blitar yang penduduknya memiliki pengeluaran terendah Rp.200.000,00-Rp.299.999,00 sedangkan 5 kabupaten lainnya dan bahkan di Jawa Timur umumnya berada pada kelompok pengeluaran Rp.100.000,00-Rp.199.999,00.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi dengan baik mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula.

1. Perhubungan

Untuk mendukung aksesibilitas antar wilayah, Kota Kediri telah memiliki infrastruktur jalan yang memadai dengan 87% dalam kondisi baik. Selain itu beberapa infrastruktur Jembatan dalam kondisi baik. Secara lengkap fasilitas jalan dapat diketahui pada tabel di bawah :

Tabel 2.54
Fasilitas Jalan (Km) di Kota Kediri

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jenis Permukaan :					
- Diaspal	331.167	331.167	331.345	334.097	335,077
- Kerikil	-	-	-	-	-
- Tanah	-	-	-	-	-
- Beton Rabat	-	-	-	-	0,187
Jumlah	331.167	331.167	331.345	334.097	335,264
Kondisi Jalan :					
- Baik	233.009	233.009	236.920	282.745	292,740
- Sedang	64.882	64.882	62.595	34.342	23,774
- Rusak	30.402	30.402	29.245	15.755	17,700
- Rusak Berat	2.875	2.875	2.585	1.255	1,050
Jumlah	331,167	331,167	331,345	334,097	335,264
Kelas Jalan :					
- Kelas I	-	-	-	-	-
- Kelas II	125.252	125.252	125.252	125.252	125,252
- Kelas III	-	-	-	-	-
- Kelas III A	47.795	47.795	47.795	47.795	47,795
- Kelas III B	50.446	50.446	50.446	50.446	50,446
- Kelas III C	92.756	92.756	92.934	92.934	92,934
- Kelas IV	-	-	-	-	-
- Tidak Dirinci	14.918	14.918	14.918	17.670	18,837
Jumlah	331,167	331,167	331,345	334,097	335,264

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri

2. Penataan Ruang

Dalam rangka penataan ruang, Pemerintah Kota Kediri menetapkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030. Perda ini merupakan pedoman pelaksanaan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Kota Kediri memiliki 3 kawasan strategis Ekonomi (kawasan perdagangan jasa, kawasan industri dan kawasan pariwisata) dan kawasan strategis lingkungan. Dan Peraturan Menteri PU No.20/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, akan tetapi belum sampai tahap pengesahan.

Berdasarkan RTRW Kota Kediri tahun 2011-2030, luas wilayah produktif di Kota Kediri pada tahun 2009 seluas 3.888,05 Ha terdiri dari wilayah pertanian ±3.085 Ha, wilayah perkebunan (ladang/kebun) ±638,87 Ha, dan wilayah kehutanan ±163,44 Ha. Maka rasio luas wilayah produktif sebesar 61,32% dari luas kawasan budidaya diusahakan menjadi lahan produktif.

Kawasan peruntukan industri Kota Kediri meliputi pengembangan kawasan industri rumah tangga di beberapa kelurahan, pengembangan industri ringan, dan mempertahankan industri besar seperti industri rokok, pabrik makanan, pengolahan kayu serta pabrik gula.

3. Sarana Perbankan dan Perhotelan

Kota Kediri merupakan pusat kawasan perekonomian di Jawa Timur. Di Kota Kediri terdapat Bank Indonesia serta berbagai macam bank, antara lain Bank Milik Pemerintah (4); Bank Swasta Nasional (18); Bank Swasta Asing (2); serta 1 Bank Milik Pemerintah Daerah. Selain itu, di Kota Kediri juga terdapat sarana antara lain hotel berbintang, hotel non bintang/melati, pondok wisata/*homestay*, penginapan remaja/*youth hostel*, vila, dan jasa akomodasi pendek lainnya. Dari 25 hotel/jasa akomodasi di Kota Kediri tahun 2016, terdapat 5 hotel berbintang, 18 hotel non bintang/melati, serta 2 pondok wisata (*homestay*). Dari 5 hotel berbintang tersebut, 2 diantaranya adalah hotel berbintang 1 dan bintang 2, serta 1 hotel bintang 4. Persentase hunian hotel mengalami peningkatan karena Kota Kediri menjadi kota persinggahan wisatawan, perekonomian dan bisnis di regional Kediri.

4. Kelistrikan

Seluruh wilayah Kota Kediri sudah teraliri layanan listrik. PT. PLN Persero menjadi pemasok untuk

kebutuhan tenaga listrik di Kota Kediri. Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik untuk melayani pelanggan rumah tangga.

Tabel 2.55
Kelistrikan di Kota Kediri Tahun 2015

Golongan Tarif	Jumlah Pelanggan	Pemakaian (KWh 1Tahun)	Pemakaian (KWh/Bulan)	Penerimaan PPJ/RPJU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sosial	21.410	5.352.278	446.023	957.938.526
a. S1	-	-	-	-
b. S2	21.402	4.416.366	368.031	790.431.128
c. S3	8	935.912	77.993	167.507.398
2. Rumah Tangga (R)	782.793	100.515.484	8.376.290	6.785.166.396
a. R1	778.351	98.120.800	8.176.733	6.623.516.382
b. R2	3.971	1.790.433	149.203	120.860.840
c. R3	471	604.251	50.354	40.789.174
3. Bisnis (B)	31.789	18.187.706	1.515.642	7.284.027.607
a. B1	26.533	4.965.407	413.784	1.988.604.922
b. B2	5.246	11.209.407	934.117	4.489.275.890
c. B3	10	2.012.892	167.741	806.146.795
4. Industri (I)	1.125	28.486.817	2.373.901	3.176.052.577
a. I1	415	275.553	22.963	30.721.959
b. I2	646	5.996.853	499.738	668.601.214
c. I3	62	8.724.878	727.073	972.754.213
d. I4	2	13.489.533	1.124.128	1.503.975.191
5. Perkantoran (P)	5.435	6.403.935	533.661	11.476
a. P1	1.857	1.714.699	142.892	3.073
b. P2	3	111.628	9.302	200
c. P3	3.575	4.577.608	381.467	8.203
6. Multiguna (M)	2	46.656	3.888	31.080.589
7. Prabayar	212.726	29.440.222	2.453.352	3.240.531.761
Jumlah	1.055.280	29.440.222	15.702.758	21.474.808.932
2014	78.321	315.704.759	26.308.730	21.530.936.216
2013	75.426	302.716.545	25.226.379	19.030.109.766
2012	71.470	289.143.481	24.095.290	16.133.757.149
2011	67.809	258.186.785	21.515.566	11.719.549.596

Sumber : PT. PLN (Persero) UB Distribusi Jatim AP Kediri

5. Komunikasi dan Informatika

Alat komunikasi saat ini sangat penting peranannya. Dengan alat komunikasi, akan dapat mempercepat dan memperlancar urusan dalam segala hal. Masyarakat atau rumah tangga Kota Kediri yang menggunakan telepon PSTN sebanyak 7,82 persen, hal ini terjadi karena banyak yang beralih menggunakan HP. Kondisi saat ini pemakaian HP lebih diminati dari pada telepon rumah. Sebab HP bisa di bawa kemana-mana, harga terjangkau baik alat komunikasinya maupun jenis operator yang digunakannya. Sehingga masyarakat bias memilih mana yang lebih baik digunakan. Sekitar 92,06 persen rumah tangga di Kota Kediri memiliki dan menggunakan HP pada tahun 2015. HP dengan segala kelebihanannya sekarang mampu digunakan untuk mengakses internet.

Kemajuan teknologi saat ini menjadikan internet menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi sebagian besar masyarakat, tidak terkecuali masyarakat/rumah tangga di Kota Kediri. Pada tahun 2015 sebanyak 33,54 persen rumah tangga di Kota Kediri telah mengakses internet setidaknya selama tiga bulan terakhir.

Tabel 2.56
**Penggunaan Alat Komunikasi Oleh Rumah Tangga
Tahun 2015**

Uraian	Ya	Tidak
Telephone	7,82	92,18
HP	92,06	7,94
Mengakses Internet	33,54	66,46

Sumber : BPS Kota Kediri

2.4.3 Fokus Fasilitasi Iklim Berinvestasi

1. Perijinan

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perizinan, Pemerintah Kota Kediri telah mengambil suatu kebijakan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Kantor Pelayanan Perijinan (KPP) dan sejak tahun 2013 berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 45 Tahun

2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berubah menjadi Badan Penanaman Modal (BPM).

Dengan diterbitkannya Perwali No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri No. 43 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdiri dari 88 jenis perijinan dengan tujuan memberikan pelayanan prima terhadap dunia usaha untuk mengurangi hambatan dalam pelayanan khususnya perijinan.

Pemerintah Kota Kediri, disamping memberikan kepastian hukum dalam penanaman modal melalui peraturan perundang-undangan juga mengadakan kegiatan penyederhanaan prosedur perijinan dan meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan menghapus atau menggabung beberapa izin atau persyaratan serta meningkatkan kualitas dan sosialisasi pelayanan perizinan secara langsung kepada masyarakat/investor.

Jenis-jenis Pelayanan Perizinan yang diberikan kepada masyarakat yaitu :

Tabel 2.57

Lama Proses Perijinan Kota Kediri

No	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rp)
1.	SIUP, IUPPT, IUPP, IUTM, TDG	3	10	Gratis
2.	Izin Penyelenggaraan Pameran	3	8	Gratis
3.	TDP	3	6	Gratis
4.	Tanda Pendaftaran Waralaba	3	10	Gratis
5.	IUI/TDI	8	9	Gratis
6.	IUJK	7	11	Gratis
7.	Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik	10	9	Gratis
8.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	10	10	Gratis
9.	Izin Eksplorasi Air Tanah	15	11	Gratis
10.	Izin Pengeboran Air Tanah	15	10	Gratis
11.	Izin Pengambilan Air Tanah (Bor)	15	12	Gratis
12.	Izin Pengambilan Air Tanah (Pasak)	15	10	Gratis
13.	Izin Perpanjangan Pengambilan Air Tanah	15	6	Gratis
14.	Izin Penurapan Mata Air, Izin Usaha perusahaan Pengeboran AT, Izin Perpanjangan Pengambilan Mata Air	15	8	Gratis
15.	Izin Pengambilan Mata Air	15	9	Gratis
16.	Izin Juru Bor	15	5	Gratis
17.	Izin Usaha Toko Hewan dan Makanan Ternak	7	8	Gratis

No	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rp)
18.	Surat Tanda Register Dokter Hewan Praktek	7	6	Gratis
19.	Izin Tempat Usaha/Operasional Jasa Medik Veteriner	7	7	Gratis
20.	Surat Tanda Register Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner	7	8	Gratis
21.	Surat Tanda Register Tenaga kesehatan Warga Negara Asing	7	8	Gratis
22.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	5	8	Gratis
23.	Izin Prinsip Penanaman Modal	3	6	Gratis
24.	Izin pendirian Rumah Sakit Tipe C dan D	15	10	Gratis
25.	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D	15	18	Gratis
26.	Izin Operasional Klinik	15	17	Gratis
27.	Izin Apotek	10	19	Gratis
28.	Izin Toko Obat	10	13	Gratis
29.	Tanda Daftar Pengobat Tradisional	10	19	Gratis
30.	Izin Pengobat Tradisional	10	8	Gratis
31.	Izin praktek dokter Umum/Gigi/Spesialis, izin praktek & kerja Bidan, izin praktek & Kerja Apoteker, Izin Praktek Refraksionis Optisien, Izin Praktek Okupasi Terapi, Izin Praktek Perawat dan Izin Kerja Perawat, Izin Praktek Perawat Gigi	3	9	Gratis
32.	Izin Praktek Fisioterapis, Izin Prasktek Tenaga Teknis Kefarmasian	3	8	Gratis
33.	Izin Praktek Terapis Wicara	3	10	Gratis
34.	Izin Gangguan	14	7	Perhitungan
35.	Izin Mendirikan Bangunan	15	8	Perhitungan
36.	Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil	3	4	Perhitungan
37.	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen	14	11	Perhitungan
38.	Rekomendasi Lokasi	14	8	Gratis

Sumber : BPM Kota Kediri

2. Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri meliputi :

- 1). Pajak Hotel;
- 2). Pajak Restoran;
- 3). Pajak Hiburan;
- 4). Pajak Reklame;
- 5). Pajak Penerangan Jalan;
- 6). Pajak Parkir;
- 7). Pajak Bea Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 8). Pajak Air Tanah dan
- 9). Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTP).

Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2016 dapat direalisasikan sebesar Rp.68.975.535,99 Rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.58
**Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan
 Retribusi Daerah**

Uraian	Jumlah Pajak yang terealisasi		Jumlah Retribusi yang terealisasi	
	2009	6 pajak	14.237.388.734,00	3 jenis retribusi
2010	6 pajak	16.923.398.116,00	3 jenis retribusi	10.084.030.919,94
2011	8 pajak	34.027.160.429,00	3 jenis retribusi	91.343.826.942,84
2012	8 pajak	11.103.585.253,39	3 jenis retribusi	9.481.856.261,50
2013	9 Pajak	57.840.761.515,71	3 jenis retribusi	9.631.747.601,76
2014	9 Pajak	57.880.912.709,71	3 jenis retribusi	9.631.747.601,76
2015	11 Pajak	70.463.225.676,27	3 jenis retribusi	9.359.561.032,00
2016	11 Pajak	87.639.209.719,01	3 jenis retribusi	9.989.929.184,67

Sumber : DPPKA Kota Kediri

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Berikut dijabarkan tabel Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Kediri yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 terjadi peningkatan untuk penduduk dengan kelulusan pendidikan sarjana dan pasca sarjana walaupun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap rasio lulusan S1/S2/S3. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tabel 2.59
Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Kediri

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah lulusan S1	23.025	19.856	22.058	23.917	24.796
2.	Jumlah lulusan S2	1.485	1.484	1.571	1.651	1.759
3.	Jumlah lulusan S3	52	53	53	54	58
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	24.562	21.393	23.682	25.622	26.613
5.	Jumlah penduduk	312.331	267.310	293.282	312.999	315.553

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,079	0,080	0,080	0,082	0,084

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri

2. Tingkat Ketergantungan

Tingkat Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase tingkat ketergantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, demikian pula sebaliknya. Berdasarkan Rasio Ketergantungan pada tabel di bawah, diketahui bahwa Tingkat ketergantungan di Kota Kediri masih dalam kisaran cukup bahkan mengalami sedikit penurunan. Hal tersebut dapat diketahui dari tabel berikut ini :

Tabel 2.60
Rasio Ketergantungan Tahun 2012 s/d 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	70.682	61.090	66.715	69.999	69.764
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	22.279	18.727	21.165	24.247	25.532
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	92.961	79.817	87.880	94.246	95.296
4.	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	219.370	187.493	205.402	218.753	220.257
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,424	0,426	0,427	0,431	0,433

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri

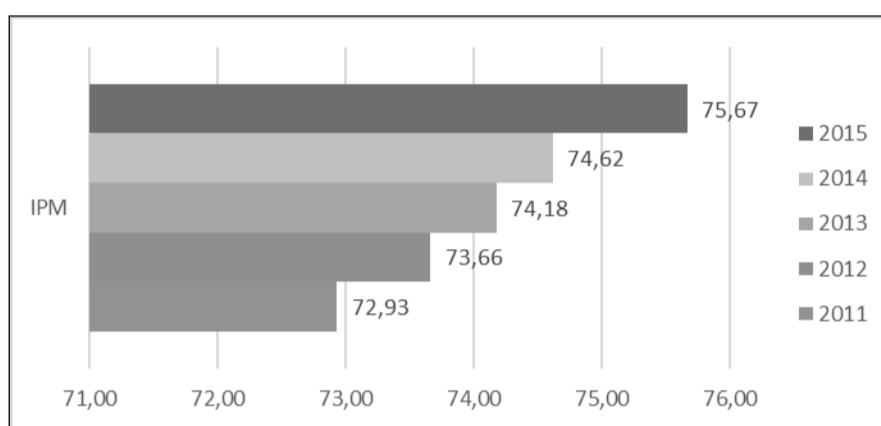
2.5 Aspek Indeks Pembangunan Manusia

Disamping menggunakan pendekatan sudut pandang ekonomi, ukuran pencapaian pembangunan juga dilihat dengan perspektif non ekonomis dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau HDI (*Human Development Index*).

Nilai Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Terhitung sejak tahun 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) merubah metode penghitungan IPM yang disebabkan karena ada beberapa indikator yang dianggap tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai

dasar penghitungan. Perubahan tersebut terdapat pada indikator Angka Melek Huruf yang tidak lagi digunakan sebagai salah satu indikator pendidikan, diganti dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah. Perubahan lainnya adalah PDRB per kapita tidak lagi digunakan sebagai dasar penghitungan indeks daya beli, yang digantikan oleh Produk Domestik Regional Netto (PDRN) per Kapita, karena dianggap lebih akurat dalam menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Perkembangan nilai IPM Kota Kediri Tahun 2011-2015 menggunakan metode baru adalah seperti pada grafik berikut :

Grafik 2.6
Perkembangan Nilai IPM Kota Kediri dengan Metode Baru Tahun 2011-2015



Sumber : Data BPS Provinsi Jawa Timur

Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa nilai IPM Kota Kediri tahun 2015 sebesar 75,67 atau meningkat sebesar 1,05 dari nilai IPM tahun 2014. Perkembangan nilai IPM mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 berturut-turut adalah sebesar 72,93 (tahun 2011), 73,66 (tahun 2012), 74,18 (tahun 2013), 74,62 (tahun 2014), dan 75,67 (tahun 2015). Adapun untuk nilai dari masing-masing komponen IPM adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.61
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri Tahun 2011 - 2015 Dengan Metode Baru

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil yang Disesuaikan (000)
2011	73,46	12,90	9,34	10.098,00
2012	73,49	13,09	9,49	10.432,00
2013	73,51	13,27	9,57	10.670,00
2014	73,52	13,52	9,70	10.702,00
2015	73,62	14,30	9,88	10.733,00

Sumber : Data BPS Provinsi Jawa Timur

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup Kota Kediri tahun 2015 mengalami peningkatan 0,10 poin dari sebesar 73,52 pada tahun 2014 menjadi sebesar 73,62 pada tahun 2015. Peningkatan capaian AHH ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat serta semakin meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Kediri.

b. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan di Kota Kediri mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir, sebagai berikut: 11,12 (2011); 11,29 (2012); 11,42 (2013); 11,61 (2014); dan 12,09 (2015). Angka Harapan Lama Sekolah Kota Kediri pada tahun 2015 telah mencapai 14,30 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah 9,88 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa seluruh penduduk Kota Kediri telah menempuh pendidikan dasar 9 tahun dan kualitas pendidikan Kota Kediri berada pada tingkatan di atas rata-rata.

c. Indeks Daya Beli

Indeks Daya Beli (IDB) masyarakat Kota Kediri juga terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2011-2015 yaitu : Rp.10.098.000,00 (2011); Rp.10.432.000,00 (2012); Rp.10.670.000,00 (2013); Rp.10.702.000,00 (2014); dan Rp.10.733.000,00 pada tahun 2015. Dengan standar BPS nilai pengeluaran per kapita disesuaikan minimum Rp.1.007.436,00 dan maksimum Rp.26.572.352,00, tingkat daya beli masyarakat Kota Kediri masuk dalam kategori Menengah Atas yang memiliki kemampuan daya beli relatif tinggi dan mampu mengimbangi perubahan kebijakan makro ekonomi, seperti kebijakan fiskal, moneter dan inflasi, sehingga dalam periode 2011-2015 angka IDB Kota Kediri meningkat secara stabil.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

